

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBANGUNAN MINAPOLITAN
BERBASIS PENATAAN RUANG PESISIR KOTA
PEKALONGAN**

PENELITI :
Valentina Arminah
Suharno
Wahyuni

**Laporan ini telah diseminarkan di hadapan Tim Evaluasi Penelitian
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tanggal 9 Juli 2013
dan diterima sebagai Laporan Penelitian**

A.n. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Tim Evaluasi Penelitian

I Gusti Nyoman Guntur, A.Ptnh., M.Si
NIP. 19621231 198603 1 062

Dr. Senthot Sudirman, M.S

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha kuasa, atas rahmat dan kasih-Nya menyertai penulis sehingga Laporan Penelitian yang berjudul “Pembangunan Minapolitan berbasis Tata Ruang Pesisir di Kota Pekalongan” dapat terselesaikan. Maksud Laporan Penelitian ini untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan guna menambah bahan ajar pada Prohram Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Dalam penulisan Laporan Penelitian ini tim peneliti banyak mendapatkan masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini penelit mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada tim peneliti untuk melakukan penelitian strategis tahun 2013 ini,
2. Dr. Senthot Sudirman, M.S selaku Tim Evaluasi Penelitian, yang telah banyak memberikan masukan yang bermanfaat bagi Laporan penelitian.
3. Kakanwil BPN Propinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan beserta staf, yang telah memberikan informasi tentang permasalahan dan data-data tentang Program Minapolitan kota Pekalongan
4. Pemda dan BPS Propinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pencarian data dan informasi yang kami butuhkan.
5. Ibu Ir. Candra Herawati, MM yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan masukan serta diskusi dan *sharing* tentang pelaksanaan program pembangunan minapolitan di Kota Pekalongan.

Tim Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu tim peneliti dengan tangan terbuka menerima segala saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Atas segala bantuan dan perhatian dari berbagai pihak tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya semoga Laporan penelitian ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, Juli 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTANA	5
A. Konsep Pembangunan Minapolitan.....	5
B. Pengelolaan Wilayah pesisir.....	6
C. Kerangka Pemikiran	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
A. Lokasi Penelitian.....	10
B. Teknik Pengumpulan Data	10
E. Teknik Analisa Data	11
BAB IV. BEBERAPA FAKTA WILAYAH PENELITIAN	12
A. Kondisi Geografis	12
B. Geologi dan Geomorfologi	15
C. Penggunaan Lahan	15
D. Kependudukan.....	17
E. Fasilitas Umum.....	17
F. Produksi Perikanan Budidaya Kecamatan Pekalongan.....	19
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Rencana Induk Zonasi Kawasan Pesisir Kota Pekalongan.....	31
B. Rencana Induk (Masterplan) Minapolitan.....	40

C. Pelaksanaan Program Pembangunan Minpolitan, Capaian dan hambatannya.....	58
BAB VI. PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Luas penggunaan lahan berdasar jenis di Kecamatan Pekalongan Utara.....	16
2. Tabel 2. Penggunaan Tanah Tiap Kelurahan Pekalongan Utara Th. 2010..	16
3. Table 3. Kepadatan Penduduk (Kotor) di Kec. Pekalongan Utara Tahun 2010.....	17
4. Tabel 4. Jumlah Sekolah di Kecamatan Pekalongan Utara 2010.....	18
5. Tabel 5. Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Pekalongan Utara.....	18
6. Tabel.6 Fasilitas Perdagangan di Kecamatan Pekalongan Utara 2010.....	19
7. Tabel 7. Hasil Perikanan Budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara.....	19
8. Tabel 8. Luas Lahan Perikanan Budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara	20
9. Table 9. Luas Lahan Potensi Perikanan Budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara.....	20
10 Tabel 10. Luas Lahan Tambak di Kecamatan Pekalongan Utara.....	21
11 Tabel 11. Jumlah (RTP) di Kecamatan Pekalongan Utara.....	22
12 Table 12. Produksi Perikanan Budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara...	23
13 Tabel 13. Jumlah Produksi Bandeng di Kecamatan Pekalongan Utara.....	24
14 Tabel 14. Jumlah Produksi Nila di Kecamatan Pekalongan Utara.....	25
15 Tabel 15. Jumlah Produksi Udang Windu di Kecamatan Pekalongan Utara	25
16 Tabel 16. Profil perikanan budidaya air payau (tambak) Kota pekalongan tahun 2012.....	27
17 Tabel 17. Profil sarana dan prasarana perikanan budidaya kota pekalongan tahun 2012.....	28
18 Tabel 18. Zonasi Penangkapan ikan, Jenis Kapal , dan Alat Tangkap.....	37
19 Tabel 19. Program Master Plan Kawasan Minapolitan Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017.....	60
20 Tabel 20. Program Kerja Jangka pendek (2013/2014) dan Realisasi Cipta Karya Kementrian PU dalam pengadaan Infrastruktur di Zona Inti dan Zona Pendukung.....	63

21	Table 21. Program Kerja Jangka pendek (2013/2014) dan Realisasi Ditjen SD, Infrastruktur di Zona Inti, Zona Pendukung dan Zona Keterkaitan.....	64
22	Tabel 22. Program Kerja Jangka pendek (2013/2014) dan Realisasi Ditjen P2HP Kementerian Kelautan dan Perikanan Infrastruktur di Zona Inti	66

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	9
2.	Gambar 2. Peta Rencana Zonasi Pesisir Kota Pekalongan.....	13
3.	Gambar 3. Peta Kontur Kota pekalongan.....	14
4.	Gambar 4. Peta Rencana Zonasi Kawasan Pesisir (RZKP) Kota Pekalongan.....	40
	...	
5.	Gambar 5. Peta Komponen Minapolitan.....	56
6.	Gambar 6. Peta Penyusunan Masterplan Minapolitan Kota Pekalongan.....	57
7.	Gambar 7 Rencana pembangunan (Masterplan) Kawasan Inti Minapolitan	67
8.	Gambar 8. Lokasi Tanah Milik Perum Pengelolaan Samudra (PPS).....	67

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesisir merupakan wilayah yang memiliki kekayaan dan keragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat tinggi. Kekayaan tersebut antara lain berupa berbagai macam jenis ikan, mangrove, terumbu karang, dan biota laut, sedangkan jasa lingkungan misalnya pariwisata, panorama yang indah, budaya, transportasi, dan komunikasi.

Potensi sumberdaya pesisir yang tersebar di seluruh wilayah nusantara merupakan salah satu modal dasar pembangunan ekonomi nasional, peningkatan devisa, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Kenyataan yang ada, hingga saat ini umumnya pemanfaatan sumberdaya pesisir belum dilakukan secara optimal dan terpadu, dalam arti belum melibatkan instansi terkait dan masyarakat.

Fungsi dan pemanfaatan wilayah pesisir harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, untuk mencapai hal ini dilakukan upaya membangun keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya kelautan dan lingkungan kawasan pesisir. Keseimbangan antara pemanfaatan, pelestarian, dan lingkungan dapat tercapai apabila dilakukan dengan pengelolaan wilayah pesisir yang baik. Pengelolaan wilayah pesisir harus memperhatikan kondisi ruang pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara terencana, rasional, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kelastarian fungsi dan keseimbangan wilayah pesisir.

Pengelolaan wilayah pesisir pada hakekatnya dilakukan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan bagi seluruh kepentingan secara terpadu, seimbang, terbuka, serasi dan berkelanjutan. Dalam perspektif tersebut, maka pengelolaan wilayah pesisir berfungsi untuk menghindarkan antara lain konflik kepentingan antar sektor dalam

memanfaatkan wilayah pesisir, mengakomodasikan kepentingan publik, dalam memanfaatkan terutama sumberdaya pesisir dan sumberdaya laut.

Kota Pekalongan mempunyai pantai yang datar, dengan sifat gelombang konstruktif dan destruktif. Pada pantai dengan sifat gelombang destruktif merupakan pantai yang seharusnya dilindungi karena adanya proses abrasi, agar pantai tidak menjadi rusak. Pantai dengan sifat gelombang destruktif akan terjadi penggerusan kearah daratan, dan pada pantai dengan sifat gelombang konstruktif akan mengalami penambahan luas daratan melalui sedimentasi. Berdasarkan kenyataan ini maka pembangunan pesisir Pekalongan harus memperhatikan adanya zona lindung dan zona budidaya di wilayah pantainya.

Salah satu wujud yang sedang dikembangkan pada pengelolaan wilayah pesisir di Kota Pekalongan adalah pembangunan 'minapolitan', yang nantinya diharapkan menjadi Kota permukiman para nelayan dilengkapi antara lain infrastruktur, industri makanan dengan bahan baku ikan dan pasar ikan. Pembangunan 'minapolitan' belum banyak dilakukan di Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan suatu kajian tentang pembangunan minapolitan yang berbasis penataan ruang pesisir.

Pada umumnya perairan pesisir pantai Pekalongan mempunyai potensi yang besar untuk usaha perikanan tangkap, apabila potensi ini dikembangkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani nelayan melalui peningkatan hasil tangkapan ikan dan produksi budidaya ikan. Minapolitan merupakan salah satu usaha untuk menaikkan hasil tangkapan ikan dan penjaminan untuk pemasarannya.

Pembangunan minapolitan harus sesuai dengan kondisi wilayah pesisir, dan kondisi wilayah pesisir dapat dicermati melalui kondisi wilayah pantainya. Keterkaitan antara ruang pantai dan pesisir dapat diketahui melalui adanya aktivitas manusia pada pesisir yang berpengaruh pada kondisi pantainya, hal ini tercermin dengan adanya erosi maupun sedimentasi yang terjadi di wilayah pantai. Kondisi wilayah pantai tidak boleh rusak karena adanya pembangunan di

daerah kepeisirannya, sehingga pembangunan minapolitan harus sesuai dengan kondisi ruang pantai dan pesisirnya.

B. Permasalahan

Kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir belum dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Pemanfaatan sumberdaya pesisir belum dilakukan secara optimal, sehingga belum memberikan manfaat yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di beberapa wilayah pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut justru telah mengakibatkan antara lain persoalan lingkungan dan sosial.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian Master Plan Zona Minapolitan terhadap Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Pekalongan
2. Bagaimana proses pelaksanaan Program Minapolitan Kota Pekalongan, hambatan dan tantangannya.

C. Tujuan

1. Mengetahui kesesuaian Master Plan Zona Minapolitan Pekalongan dengan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Pekalongan
2. Mengkaji proses pelaksanaan Minapolitan serta hambatan-hambatannya

D. Manfaat Penelitian:

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Memperkaya khasanah pengetahuan tentang Minapolitan
2. Perencanaan pengembangan pemanfaatan ruang pesisir

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembangunan Kawasan Minapolitan

Konsep Pembangunan Kawasan Minapolitan tidak lepas dari perkembangan konsep pembangunan kawasan berbasis kewilayahan. Pada awal tahun 1950-an telah dikenal konsep pembangunan metropolitan yang diaplikasikan untuk mengembangkan kawasan aglomerasi kota (kota yang bertumbuh secara bertahap) dengan sokongan Kota-Kota kecil yang berada dalam jangkauan radius commuting dengan pusat Kota aglomerasi. Keterkaitan antara pusat kota aglomerasi dengan pusat kota-pusat kota kecil (metro) di sekelilingnya adalah penyediaan tenaga kerja yang kemudian berefek terhadap mobilitas tenaga kerja sehingga melahirkan aktifitas-aktifitas layanan komersial. ((Lewis, 2004; Budd & Whimster, 2005; Razin *et al.*, 2007 dalam Wiadnya, 2011). Konsep metropolitan ini berkembang sangat pesat, namun menimbulkan efek negative, diantaranya adalah urbanisasi yang massiv, yang pada akhirnya menimbulkan situasi yang kumuh karena migrasi manusia dari desa ke Kota besar tanpa adanya bekal ketrampilan atau keahlian yang memadai. Dari sisi perencanaan tata ruang berkembangnya kawasan metropolitan juga menimbulkan dampak negative karena pertumbuhan ekonomi yang pesat memerlukan daya dukung keruangan yang makin besar sehingga semakin berpotensi terhadap pelanggaran rencana tata ruang dan wilayah.

Pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap kelemahan-kelemahan konsep pembangunan metropolitan dicetuskan konsep pembangunan berbasis pertanian sebagai penggerak utama ekonominya. Teori ini dipandang sebagai solusi untuk menarik aglomerasi urban dari wilayah metropolitan. Namun agropolitan dirancang pada kapasitas daya dukung tertentu, dengan ukuran Kota kecil. Setelah daya dukung terlewati, kawasan agropolitan menjadi tidak ekonomis dan urbanisasi diharapkan akan berhenti. Singkatnya, dimensi agropolitan ketika itu

dibayangkan sebagai Kota kecil (ukuran penduduk sekitar 10 – 25 ribu jiwa), ditambah beberapa wilayah kecamatan di sekitarnya (pada radius commuting) dengan jarak sekitar 5 – 10 km dari pusat Kota. Suatu kawasan agropolitan akan berdimensi penduduk antara 50 – 150 ribu jiwa.

Konsep Agropolitan inilah yang kemudian diadopsi untuk pengembangan kawasan pesisir, yang dinamakan Konsep Minapolitan, dan tentu saja sektor perikanan diharapkan menjadi motor penggerak ekonominya. Mengingat kepadatan penduduk di wilayah pesisir biasanya lebih tinggi dari wilayah pertanian maka karakteristik keruangan pembangunan kawasan minapolitan sedikit berbeda dengan konsep pembangunan agropolitan

B. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pada umumnya orang menganggap bahwa pengertian pesisir lebih terbiasa didengar daripada pengertian pantai, sehingga istilah pesisir lebih populer daripada pantai. Daerah pesisir mempunyai potensi yang besar. Hingga saat ini daerah pesisir belum dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan daerah pantai merupakan tantangan di masa depan bagi penataan dan pemanfaatan ruang pesisir. Pengelolaan pesisir perlu mengetahui dinamika yang terjadi di wilayah pantainya. Perubahan garis pantai antara lain disebabkan oleh aktivitas manusia pada pantainya (Carter, 1992).

Pantai merupakan daerah yang langsung mendapat tekanan dari laut. Pantai merupakan bagian dari pesisir dan sangat dinamis, dinamika pantai dapat terjadi dalam hitungan detik hingga hitungan hari, bulan dan tahun maupun hitungan waktu yang lebih panjang. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Wilayah pesisir ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, dan ke arah laut merupakan bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses salami yang terjadi di darat (Dulbahri, 2002).

Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam kuliah umum di Universitas Surabaya mengemukakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya keras dalam memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan dengan menyinergikan dan mengharmonisasikan tiga strategi terobosan yaitu industrialisasi kelautan dan perikanan, “blue economy” dan minapolitan. Ketiga strategi ini sebagai langkah percepatan nilai tambah maupun daya saing yang mengusung paradigma ekonomi berkelanjutan berbasis pada wilayah dan kawasan. Hal tersebut sebagai langkah strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat simpul-simpul pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan agar dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah (<http://www.metronews.com>, 2012)

Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut harus tetap mempertimbangkan azas lestari dan berkelanjutan. Pemanfaatan dan pengembangan ruang kelautan dibagi menjadi zone preservasi, konservasi, dan pemanfaatan. Zone preservasi mempunyai ekosistem yang unik, zona ini merupakan daerah pemijahan, pembesaran, dan alur migrasi biota laut, kegiatan yang diperbolehkan pada zone ini adalah pendidikan dan penelitian ilmiah. Pada zone konservasi diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan secara terbatas dan terkendali, misalnya untuk wisata alam. Zone pemanfaatan diperuntukkan bagi pembangunan, seperti industri, tambak, permukiman, dan pelabuhan (Anonim, 2002). Pada saat ini di Indonesia dikembangkan kawasan minapolitan, yaitu kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditi kelautan dan perikanan, jasa, perumahan, dan kegiatan terkait (Fadel Muhamad, 2012).

Syarif Hidayatullah (2012) menegaskan bahwa saat ini Kota-Kota pantai peranannya menurun mulai dari peradaban, perdagangan, sampai pada pendidikan, padahal Negara kita adalah Negara maritim. Majunya maritim dimulai dari Kota-Kota pantai, namun yang terjadi saat ini Kota pantai justru semakin tenggelam karena pergeseran pembangunan kearah darat.

Mendasarkan hal ini maka pembangunan dan pengembangan Kota pantai perlu mendapat perhatian.

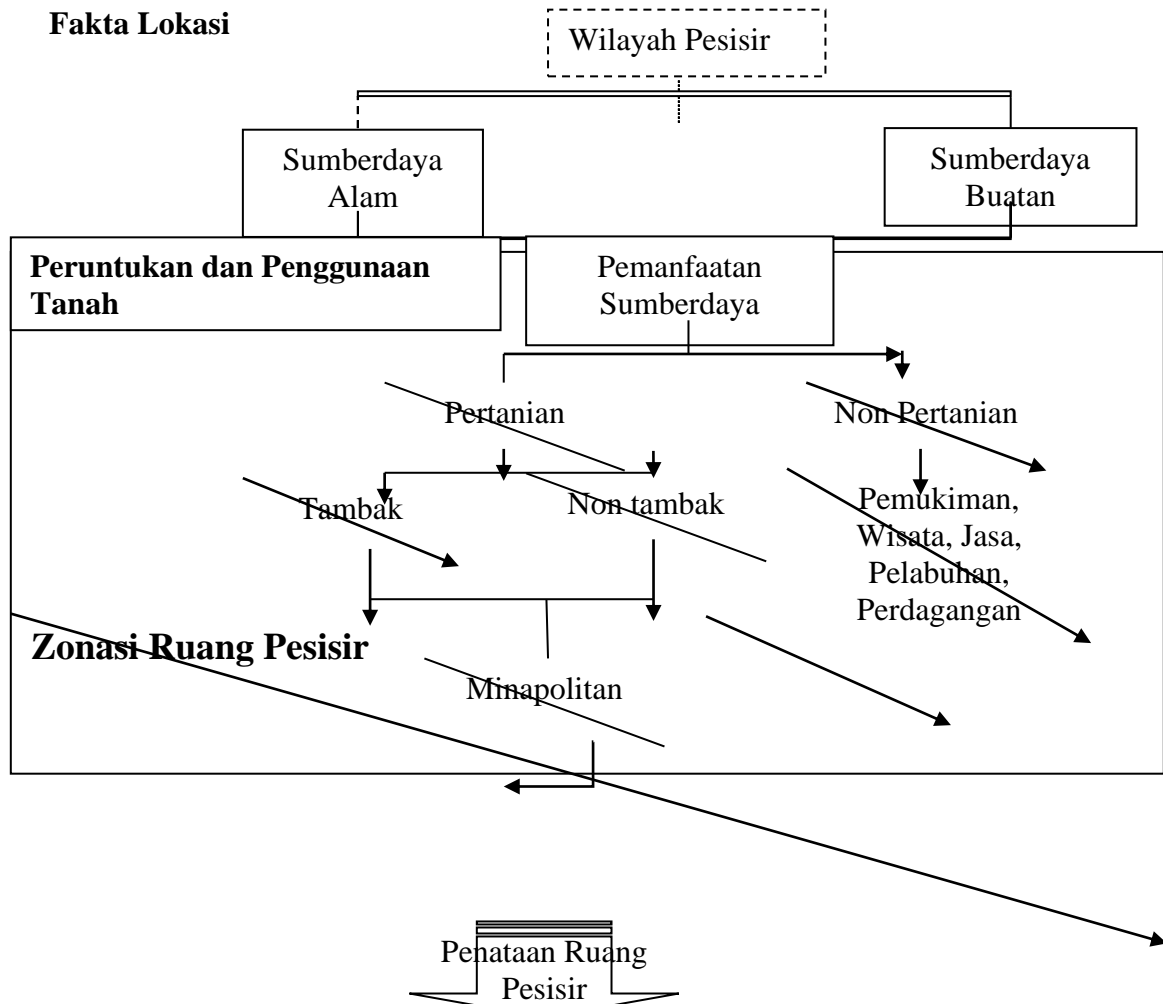
Wilayah pesisir Pekalongan mempunyai pantai yang datar, sehingga lahan pertanian di pantai Pekalongan sering tergenang air, hal ini menyebabkan menurunnya produksi padi. Pemerintah Kota Pekalongan menganjurkan kepada warga yang mempunyai lahan pertanian tidak produktif untuk mengalihfungsikan lahan pertaniannya menjadi tambak, karena sektor perikanan di Kota Pekalongan mempunyai prospek yang menjanjikan di masa yang akan datang. Untuk mengembangkan sektor pertanian pemerintah Kota Pekalongan berencana membangun minapolitan, dengan harapan kejayaan sektor perikanan yang pernah dicapai dapat diraih kembali, dan taraf hidup masyarakat pesisir menjadi lebih baik (<http://www.metronews.com>, 2012).

Dari pustaka yang telah dipelajari dapat dikemukakan, bahwa daerah pesisir masih perlu untuk dikembangkan, pengembangan dan pemanfaatan daerah pesisir harus selalu berorientasi pada penyelamatan wilayah pantainya. Pengembangan dan pemanfaatan daerah pesisir dapat dengan pembangunan minapolitan, terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan sumberdaya dan potensi ikan yang ada, namun harus tetap memperhatikan kondisi ruang pesisir dan pantai yang ada.

KERANGKA PIKIR

Wilayah pesisir kaya akan sumber daya terutama sumberdaya alamnya seperti mangrove, ikan dan potensi garam. Pemanfaatan sumberdaya pesisir pada umumnya belum dilakukan secara optimal. Pemanfaatan sumberdaya lahan di daerah pesisir perlu ditata dengan baik dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah pesisir dan pantainya. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat dilakukan dengan mengatur penggunaan ruang antara lain untuk permukiman, wisata, jasa, pelabuhan dan tambak. Penataan ruang pesisir pada satuan lokasi yang diperuntukkan

bagi tambak, wisata, jasa, pelabuhan dan permukiman sering disebut dengan pembangunan minapolitan.



BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di pesisir utara Kota Pekalongan. Pada saat ini Kota Pekalongan sedang mengembangkan potensi perikanan melalui pembangunan minapolitan. Program pembangunan minapolitan antara lain dimaksudkan untuk mengoptimalkan manfaat potensi perikanan yang sudah ada dan untuk meningkatkan hasil tangkapan serta produksi budidaya ikan.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan terutama di Kantor Pertanahan untuk mengetahui penggunaan tanah dan status tanah di daerah penelitian. Peta topografi juga diperlukan untuk mengetahui kondisi topografi daerah penelitian dan peta ini diperlukan pula untuk membuat peta dasar. Kecuali peta topografi, pada penelitian ini diperlukan antara lain peta penggunaan tanah, peta administrasi, dan peta tata ruang daerah penelitian. Data ini dikumpulkan melalui sumber data yang diperkirakan bertanggung jawab atas validitas datanya terutama melalui dasar legalisasinya. Data juga akan dikumpulkan di kantor Pemerintah Daerah, kantor kecamatan, dan kantor desa terutama untuk data sosial ekonomi dan penduduk daerah penelitian.

Rincian data yang akan dikumpulkan di dalam penelitian ini antara lain:

- jumlah penduduk
- matapencaharian penduduk
- umur penduduk
- jumlah nelayan
- iklim
- status tanah

- penggunaan tanah
- tinggi tempat
- produksi ikan tambak
- hasil tangkapan ikan dari laut
- jenis ikan tambak
- jenis ikan laut
- harga jual ikan

C.

Analisis Data

Data sosial ekonomi dan penduduk disajikan dalam bentuk tabel dan kemudian dinarasikan terkait dengan tujuan dari penelitian ini. Sebagai contoh dari data jenis ikan tangkap dan harga jual akan diketahui potensi ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Data pengaturan penggunaan ruang dalam kawasan minapolitan dianalisis secara keruangan dengan memanfaatkan peta-peta yang diperlukan dan tersedia di daerah penelitian. Analisis tumpang susun antara peta administrasi dan peta penggunaan tanah akan diketahui cakupan wilayah administrasi yang diperuntukkan bagi pembangunan kawasan minapolitan. Analisis tumpang susun antara peta rencana tata ruang dan peta kawasan minapolitan akan diketahui kesesuaian antara pembangunan kawasan minapolitan dengan rencana tata ruangnya. Dari peta kesesuaian tersebut akan dikaji pengaturan penggunaan ruang di kawasan minapolitan.

BAB IV

BEBERAPA FAKTA WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi geografis

Secara umum, wilayah penelitian adalah wilayah Kota Pekalongan. Kota Pekalongan secara geografis berada di antara 6°50'42" – 6°55'44" LS dan 109°37'55" – 109°42'19" BT, dan secara administratif letaknya berbatasan dengan:

Sebelah Timur: Kabupaten Batang

Sebelah Selatan : Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang

Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

Sebelah Utara : Laut Jawa

Kota ini secara geografis memiliki potensi strategis, karena dilalui jalur transportasi regional yang menghubungkan antara Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah dan mempunyai jalur transportasi antar kabupaten antara lain Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang sampai Banjarnegara,

Secara administratif, Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 Kecamatan yakni Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur dan Pekalongan Selatan. Luas wilayah Kota Pekalongan tercatat seluas 4.525 Ha, atau sekitar 0,14% dari luas Provinsi Jawa Tengah (Luas Jawa Tengah 3.254.000 Ha).

Berdasarkan data dari stasiun Meteorologi dan Geofisika Kota Pekalongan, banyaknya curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (844mm) dan terendah pada bulan Agustus (0mm). Jumlah hari hujan banyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 23 hari, sedangkan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus sebanyak 0 hari.

Secara khusus, berdasarkan zonasi wilayah (Mengacu pada Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 523/138 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kota Pekalongan, Zona Inti Kawasan Minapolitan berada pada sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas wilayah sebesar 73,62 Ha. Topografi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan sekitarnya merupakan daerah dataran rendah landai, kawasan pesisir dengan ketinggian kurang lebih 1 meter dpl. Secara geografis Kecamatan Pekalongan Utara berada pada kawasan pesisir yang dibatasi oleh:

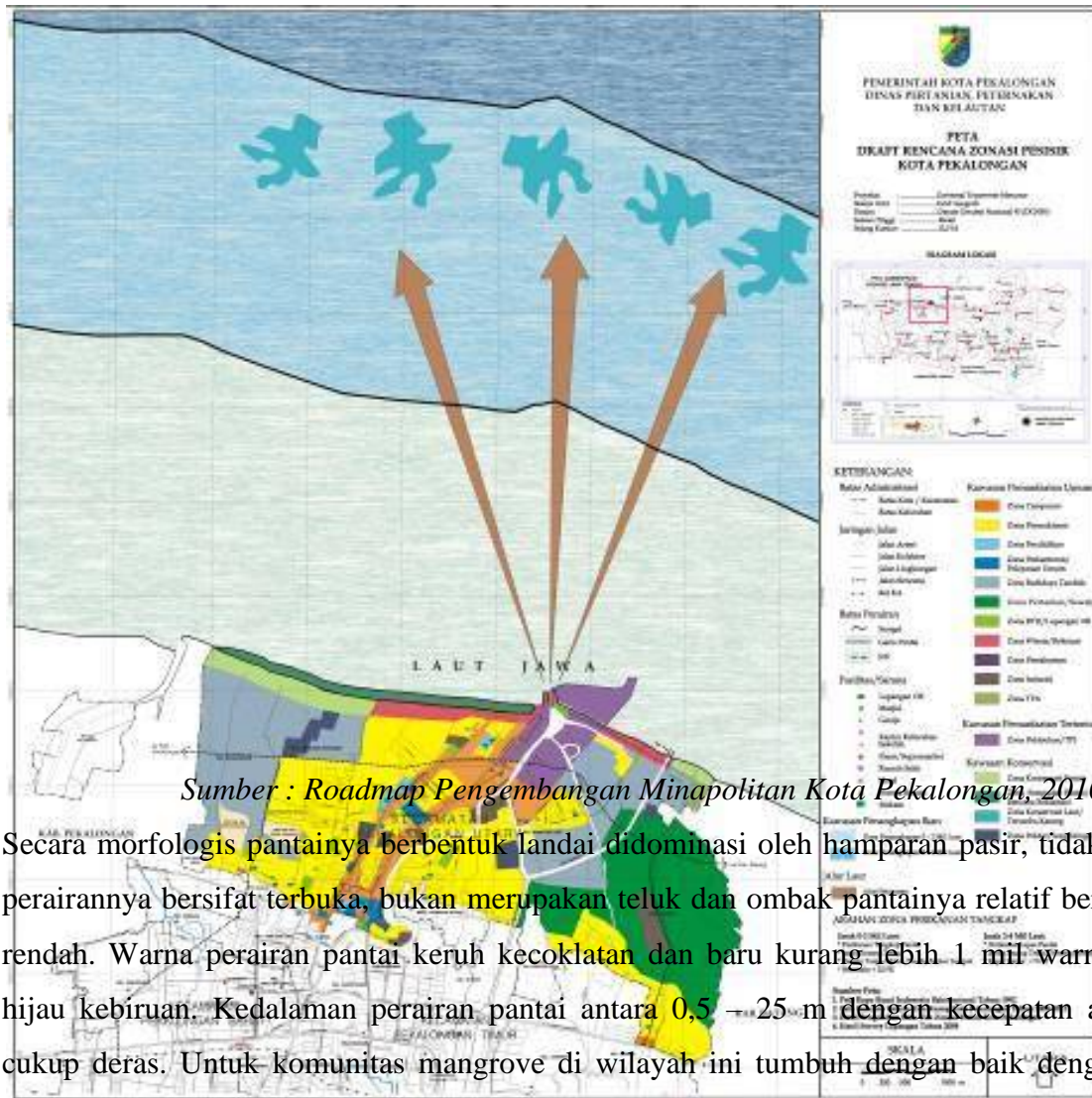
Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Sebelah Selatan : Kecamatan Pekalongan Selatan

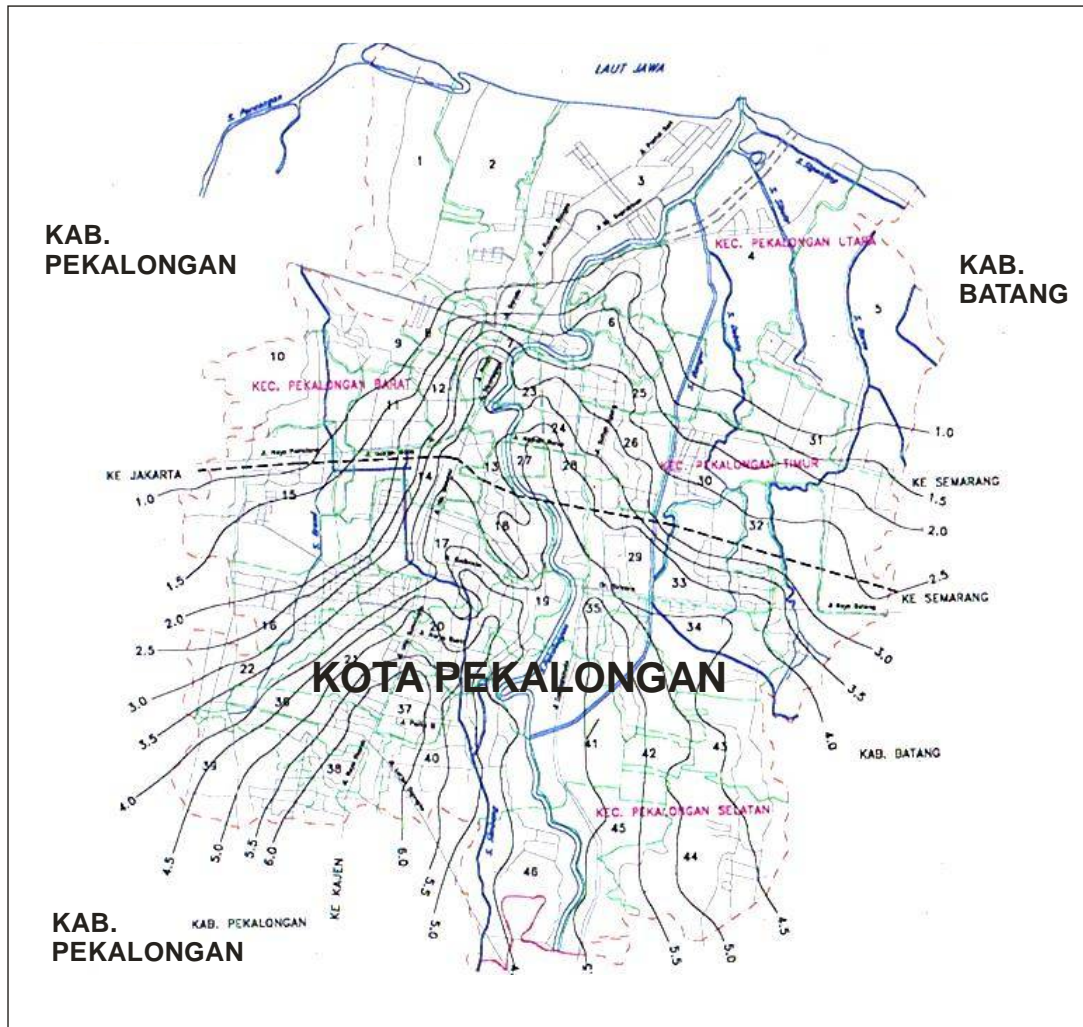
Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

Gambar 2. Peta Rencana Zonasi Pesisir Kota Pekalongan



Secara morfologis pantainya berbentuk landai didominasi oleh hamparan pasir, tidak berbatu, perairannya bersifat terbuka, bukan merupakan teluk dan ombak pantainya relatif berkekuatan rendah. Warna perairan pantai keruh kecoklatan dan baru kurang lebih 1 mil warna terlihat hijau kebiruan. Kedalaman perairan pantai antara 0,5 – 25 m dengan kecepatan arus yang cukup deras. Untuk komunitas mangrove di wilayah ini tumbuh dengan baik dengan tinggi pohon rata-rata mencapai 2-3 m.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (PWP) dan Pulau-Pulau Kecil, Kota Pekalongan telah memiliki empat dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, dan Rencana Pengelolaan wilayah pesisir dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir (RAPWP). Ke empat dokumen perencanaan ini, menjadi dasar dalam rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Pekalongan Utara terutama terkait dengan kebutuhan yang ada dalam zona pendukung.



Gambar 3. Peta Kontur Kota Pekalongan

B. Geologi Dan Geomorfologi

Wilayah Kota Pekalongan berupa litologi batuan, terutama di Kecamatan Pekalongan Utara, merupakan endapan sedimen *alluvium*, terbentuk pada jaman *holosen* periode tersier dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa.

(Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan, Skala 1 : 100.000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung) Endapan *alluvium* ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi *Ligung* yang bersusunan *andesit*, lava *andesit hornblend* dan *tufa* yang merupakan bagian atas formasi *Ligung* yang terbentuk pada *pliosen* akhir – *pliosen* awal. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa lapisan *alluvium* pada permukaan di sepanjang pantai di dominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Sedangkan Geomorfologi pantai di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa bentuk pantai relatif landai dengan kemiringan kurang dari 3° . Bentuk morfologi pantai di bagian

barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian timur, berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran *alluvial* dan dataran *alluvial* pantai. Dataran *alluvial* merupakan hasil proses *fluvial* dan sedangkan dataran *alluvial* pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

C. Penggunaan Lahan

Lahan di Kecamatan Pekalongan Utara didominasi oleh pertanian tanah basah dengan persentase luas lahan sekitar 34,35%, kemudian pemukiman 23,58%, perikanan 16,82%, pertanian tanah kering 6,42%, lain-lain 4,04%, secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.

Luas penggunaan lahan berdasar jenis di Kecamatan Pekalongan Utara

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Pertanian tanah basah	511,19	34,35
Pemukiman	350,98	23,58
Perikanan	250,28	16,82
Pertanian tanah kering	95,46	6,42
Lain-lain	60,12	4,04
Sungai	55,79	3,75
Rawa/semak	47,95	3,22
Industri pengolahan pertanian	29,49	1,98
Jasa Pemerintahan	25,30	1,70
Jasa Pendidikan	18,63	1,25
Kawasan pantai	11,64	0,78
Kuburan	7,59	0,51
Jasa Kesehatan	6,35	0,43
Pasar/LU/Perdagangan umum	6,12	0,41
Jasa Pelayanan Umum	4,69	0,32
Sarana Transportasi	2,30	0,15
Jasa Peribadatan	1,92	0,13
Taman Kota	1,24	0,08
Industri non pertanian	0,95	0,06
	1.488	100.00%

Sumber : Neraca Penatagunaan Tanah Kota Pekalongan, Kanwil BPN Prov. Jateng 2009

Tabel 2

Penggunaan Tanah Tiap Kelurahan Pekalongan Utara Th. 2010

No.	KELURAHAN	PENGGUNAAN TANAH (Ha)		JUMLAH (Ha)
		T. SAWAH	T.KERING	
1	Pabean	17	67	84
2	Kraton Lor	-	28	28
3	Dukuh	-	53	53
4	Bandengan	66	155	221
5	Kandangpanjang	-	151	151
6	Panjang Wetan	-	141	141
7	Krapyak Kidul	39	28	67
8	Krapyak Lor	98	214	312
9	Degayu	120	217	337
10	Panjang Baru	-	94	94
	Jumlah	340	1,148	1,488
	2009	340	1,148	1,488
	2008	340	1,148	1,488
	2007	340	1,148	1,488

Nomor: 4,5,6 dan 8,9,10 adalah kelurahan kawasan pesisir.

Sumber : BPS Kota Pekalongan

Catatan : saat ini tanah sawah di Bandengan sudah menjadi tambak semua.

(pantauan di lapangan dan informassi masyarakat setempat, 2012)

D. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2010 sebanyak 73.159 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 35.592 jiwa (48,65% dari total penduduk) dan penduduk perempuan sebanyak 37.567 jiwa (51,35% dari total penduduk). Kepadatan penduduk di Kecamatan Pekalongan Utara sesuai dengan data Kota Pekalongan dalam Angka 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Pekalongan Utara Tahun 2010 Pekalongan Utara dapat dipaparkan sebagai berikut :

68.965 umat Islam, 2.026 umat Kristen 1.517 umat Katolik 19 umat Hinda

612 umat Budha dan 20 umat lainnya.

Tabel 3.

Kepadatan Penduduk (Kotor)
di Kec. Pekalongan Utara Tahun 2010

No	Kelurahan	Luas Daerah KM ²	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk Per KM ²
1	Pabean	0.84	1,875	1,980	3,855	4,589

2	Kraton Lor	0.28	2,389	2,686	5,075	18,125
3	Dukuh	0.53	1,886	2,134	4,020	7,585
4	Bandengan	2.21	2,863	2,976	5,839	2,642
5	Kandangpanjang	1.51	5,359	5,730	11,089	7,344
6	Panjang wetan	1.41	6,214	6,485	12,699	9,006
7	Krapyak kidul	0.67	2,856	2,784	5,640	8,418
8	Krapyak Lor	3.12	5,111	5,465	10,576	3,390
9	Degayu	3.37	2,635	2,877	5,512	1,639
10	Panjang Baru	0.94	4,404	4,450	8,854	9,419
	Jumlah	14.88	35,592	37,567	73,159	4,917

Sumber : BPS Kota Pekalongan 2011

E. Fasilitas Umum

Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, yang berada di wilayah pesisir memiliki fasilitas pendidikan berupa SD, SMP, SMA dan SMK yang tersaji dalam table dibawah ini. Sedangkan fasilitas kesehatan terdapat Rumah Sakit khusus (Paru-paru) dan tiga Puskesmas yang mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Pekalongan Utara.

Tabel 4.

Jumlah Sekolah di Kecamatan Pekalongan Utara 2010

No	Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA/SMK
1	Pabean	-	1	-	-
2	Kraton Lor	2	1	1	1
3	Dukuh	4	2	1	2
4	Bandengan	-	2	-	-
5	Kandangpanjang	2	10	3	-
6	Panjang Wetan	3	4	1	-
7	Krapyak Kidul	-	2	-	-
8	Krapyak Lor	4	5	2	-
9	Degayu	-	2	-	-
10	Panjang Baru	2	4	1	1
		17	33	9	4

Sumber : Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka, 2011

Tabel 5

Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Pekalongan Utara

No	Kelurahan	RS	Puskesmas	Pustu	Posyandu
1	Pabean		-	-	5
2	Kraton Lor		-	-	8
3	Dukuh		1	-	6
4	Bandengan		-	1	6
5	Kandangpanjang	1	-	1	15
6	Panjang Wetan		1	1	13

7	Krapyak Kidul		1	-	6
8	Krapyak Lor		-	1	13
9	Degayu		-	1	6
10	Panjang Baru		-	-	11
		1	3	5	89

Sumber : Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka, 2011

Fasilitas perdagangan, didukung oleh keberadaan Pasar di Kandang Panjang, Krapyak Kidul dan Degayu yang berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Tabel 6

Fasilitas Perdagangan di Kecamatan Pekalongan Utara 2010

No	Kelurahan	Pasar	Toko	Kios	Warung
1	Pabean	-	29	-	42
2	Kraton Lor	-	14	-	24
3	Dukuh	-	36	-	78
4	Bandengan	-	-	-	253
5	Kandangpanjang	1	49	5	84
6	Panjang Wetan	-	39	-	190
7	Krapyak Kidul	1	8	5	21
8	Krapyak Lor	-	6	-	67
9	Degayu	1	15	30	2
10	Panjang Baru	-	6	-	10
		3	202	40	771

Sumber : Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka, 2011

F. Produksi Perikanan Budidaya Kecamatan Pekalongan Utara

1. Sumberdaya Perikanan Budidaya

Penggunaan lahan Kecamatan Pekalongan Utara yang menjadi pemasok utama produksi perikanan di Kota Pekalongan, diarahkan untuk mendukung keberadaan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Penggunaan lahan perikanan darat di Kecamatan Pekalongan Utara, sesuai fungsinya sebagai zona pendukung adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Hasil Perikanan Budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara

Tahun	Bandeng	Belanak	Udang	Rucah	Jumlah
2010	105.000	-	12.200	202.800	320.000

2009	71.000	-	11.000	195.800	277.800
2008	64.300	-	7.070	190.300	261.670
2007	64.600	-	6.150	91.100	161.850
2006		-	6.100	89.300	139.200

Sumber : Kota Pekalongan Utara Dalam Angka, 2011

Data luas lahan perikanan budidaya yang tersebar pada 6 kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel. 8

Luas Lahan Perikanan Budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara

No	Kelurahan	Luas Lahan Perikanan Budidaya (Ha)		
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010
1	Degayu	60.0	70.0	80.0
2	Krapyak Lor	30.0	40.0	50.0
3	Panjang Baru	10.0	15.0	20.0
4	Bandengan	60.0	70.0	80.0
5	Pabean	10.0	20.0	30.0
Total		170.0	215.0	260.0

Sumber : Profil Desa Perikanan Kecamatan Pekalongan Utara, 2008-2011

Sedangkan luas lahan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lahan perikanan budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara, adalah sebagai berikut :

Tabel. 9

Luas Lahan Potensi Perikanan Budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara

No	Kelurahan	Luas Lahan Perikanan Budidaya (Ha)		
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010
1	Degayu	110.0	110.0	100.0
2	Krapyak Lor	50.0	50.0	45.0
3	Panjang Baru	-	-	-
4	Bandengan	110.0	100.0	80.0
5	Pabean	50.0	40.0	20.0
Total		320.0	300.0	245.0

Sumber : Profil Desa Perikanan Kecamatan Pekalongan Utara, 2008-2011

Perikanan budidaya yang efektif untuk dikembangkan di Kecamatan Pekalongan Utara berupa budidaya air payau, untuk luas lahan tambak di Kecamatan Pekalongan Utara mengalami penurunan dari tahun 2009, tetapi mulai meningkat dan dikembangkan lagi di kawasan Minapolitan pada tahun 2010.

Tabel. 10

Luas Lahan Tambak di Kecamatan Pekalongan Utara

No	Kelurahan	Luas Lahan Perikanan Budidaya (Ha)		
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010
1	Degayu	42.0	44.0	52.0
2	Krapyak Lor	17.0	18.0	22.0
3	Panjang Baru	8.0	9.0	9.0
4	Bandengan	43.0	45.0	51.0
5	Pabean	8.0	8.0	8.0
Total		118.0	124.0	142.0

Sumber : Profil Desa Perikanan Kecamatan Pekalongan Utara, 2008-2011

2. Sarana Prasarana Budidaya Ikan

Sarana prasarana untuk produksi perikanan budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara, keberadaannya ikut mendukung berkembangnya usaha perikanan budidaya. Sarana dan prasarana budidaya ikan antara lain dengan adanya saluran primer dan tersier untuk kebutuhan budidaya tambak, UPR lele, UPR Bandeng dan BBI pusat benih ikan air tawar Kota Pekalongan.

3. Kelembagaan Usaha dan Kemitraan Usaha Bidang Perikanan

Aktivitas para pembudidaya diwadahi dalam kelembagaan organisasi perikanan budidaya yang tersebar di Kecamatan Pekalongan Utara, sebanyak 30 kelompok yang bergerak pada pengembangan udang, bandeng, nila, lele, ikan hias dan rumput laut.

Untuk kelembagaan usaha khususnya bidang perikanan budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara yang bergerak pada industri pengolahan hasil perikanan budidaya, memiliki bentuk kelembagaan berupa Perseroan Terbatas, CV maupun Firma bahkan banyak kelompok yang tidak memiliki badan hukum.

4. Perkembangan Perikanan Budidaya Kecamatan Pekalongan Utara

- a. Rumah Tangga Perikanan (RTP) /Perusahaan Perikanan Budidaya

Kecamatan Pekalongan Utara yang sebagian besar wilayah nya merupakan kelurahan dengan komoditas utama perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Untuk jumlah rumah tangga perikanan budidaya secara perorangan di Kecamatan Pekalongan Utara dari tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel. 11
Jumlah (RTP) di Kecamatan Pekalongan Utara

No	Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (org)		
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010
1	Degayu	70.0	48.0	90.0
2	Krapyak Lor	36.0	50.0	60.0
3	Panjang Baru	18.0	20.0	25.0
4	Bandengan	60.0	70.0	80.0
5	Pabean	15.0	27.0	40.0
Total		119.0	215.0	295.0

Sumber : Profil Desa Perikanan Kecamatan Pekalongan Utara, 2008-2011

Peningkatan RTP dari satu sisi mengindikasikan bahwa potensi perikanan budidaya di Kota Pekalongan mengalami peningkatan produksi dan mulai menjadi mata pencaharian pokok masyarakat di wilayah pesisir pantai, hal ini sejalan dengan rencana pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Pekalongan Utara.

b. Pembenihan Perikanan Budidaya

Sebagian besar kebutuhan benih perikanan budidaya disupply dari Kabupaten Tegal, Jepara dan Kabupaten Pekalongan, untuk wilayah Kota Pekalongan memiliki unit-unit yang mengelola pembenihan baik lele maupun bandeng. Komoditas bandeng, sudah ada produksi benih yang dilakukan oleh UPP Kota Pekalongan yang menghasilkan benih nener 100.000 ekor/bulan. Komoditas lele, produksi benih dilakukan oleh BBI Lokal Kota Pekalongan dengan menghasilkan benih lele sebanyak 70.000 ekor/bulan dan UPR Slamet Riyadi dengan menghasilkan benih lele sebesar 100.000 ekor/bulan.

c. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara yang tersebar di wilayah zona pendukung kawasan Minapolitan dari tahun 2008 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 12.

Produksi Perikanan Budidaya di Kecamatan Pekalongan Utara

No	Kelurahan	Komoditas	Produksi (ton)		
			Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010
1	Degayu	Bandeng	20.0	20.0	50.0
		Nila	0.6	2.0	6.0
		Udang Windu	3.0	7.6	10.0
2	Krapyak Lor	Bandeng	12.0	11.0	30.0
		Nila	0.9	1.0	3.0
		Udang Windu	4.0	2.0	5.0
		Kepiting	0.5	1.0	5.0
3	Panjang Baru	Bandeng	8.0	3.0	10.0
4	Bandengan	Bandeng	37.0	8.0	40.0
		Rumpul Laut	45.0		140.0
		Kepiting	3.8	2.8	2.0
		Nila			1.0
5	Pabean	Bandeng	11.0		25.0
		Kepiting	0.9		6.0
Jumlah			146.7	58.4	333

Sumber : Profil Desa Perikanan Kecamatan Pekalongan Utara, 2008-2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perikanan budidaya jenis bandeng, menjadi produk unggulan yang tersebar merata daerah/kelurahan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Untuk hasil produksi perikanan budidaya jenis komoditas bandeng, terjadi penurunan sebesar 48% pada tahun 2009 tetapi pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 242,5% karena adanya permintaan pasar dan industri pengolahan yang besar.

Tabel. 13

Jumlah Produksi Bandeng di Kecamatan Pekalongan Utara

No	Kelurahan	Jumlah Produksi Bandeng (ton)		
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010
1	Degayu	20.0	20.0	50.0
2	Krapyak Lor	12.0	11.0	30.0
3	Panjang Baru	8.0	3.0	10.0
4	Bandengan	37.0	8.0	40.0
5	Pabean	11.0		25.0
Total		88.0	44.0	155.0

Sumber : Profil Desa Perikanan Kecamatan Pekalongan Utara, 2008-2010

Hasil produksi perikanan budidaya jenis komoditas nila, baru tiga kelurahan yang mengembangkan komoditas ini dengan jumlah produksi masih jauh dari target yang diharapkan. Padahal jenis ikan ini sangat tinggi untuk permintaan pasar dunia. Indonesia sebagai salah satu pemasok fillet nila masih belum bisa mencukupi kebutuhan pasar tersebut, sehingga peluang pengembangan komoditas ini masih terbuka luas.

Tabel. 14

Jumlah Produksi Nila di Kecamatan Pekalongan Utara

No	Kelurahan	Jumlah Produksi Nila (ton)		
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010
1	Degayu	0.6	2.0	6.0
2	Krapyak Lor	0.9	1.0	3.0
3	Bandengan			1.0
Total		2.0	3.0	10.0

Sumber : Profil Desa Perikanan Kecamatan Pekalongan Utara, 2008-2011

Untuk hasil produksi perikanan budidaya jenis komoditas udang terutama udang windu, terjadi pening sebesar 48% pada tahun 2009 tetapi pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 242,5% karena adanya permintaan pasar dan industry pengolahan yang besar.

Tabel. 15

Jumlah Produksi Udang Windu di Kecamatan Pekalongan Utara

No	Kelurahan	Jumlah Produksi Nila (ton)		
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010
1	Degayu	3.0	7.6	10.0
2	Krapyak Lor	4.0	2.0	5.0
Total		7.0	9.6	15.0

Sumber : Profil Desa Perikanan Kecamatan Pekalongan Utara, 2008-2011

5. Potensi Ekosistem Hutan Mangrove

Ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir, memiliki fungsi mitigasi terhadap banjir rob yang setiap saat menggenangi wilayah pesisir. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan social yang penting dalam pembangunan wilayah pesisir. Pengembangan hutan mangrove di Kota Pekalongan tidak hanya berfungsi sebagai upaya perbaikan atau rehabilitasi

kawasan pesisir yang terus mengalami abrasi dan rob, tetapi juga sangat menarik untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata yang sekarang sudah mulai dikembangkan. Hutan mangrove juga memiliki manfaat :

- Sebagai tempat pemijahan ikan di perairan
- Sebagai pelindung daratan dari abrasi oleh ombak
- Sebagai penyaring intrusi laut air laut
- Sebagai tempat migrasi burung
- Sebagai habitat satwa liar
- Peran sosial ekonomis, dimana mangrove dapat digunakan sebagai bahan arang, bahan bangunan dan obat-obatan

Untuk regulasi sebagai dasar pengembangan hutan mangrove di Kota Pekalongan, telah diterbitkan SK Walikota Pekalongan 532.05/134/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah. Secara kelembagaan untuk penanganan lingkungan telah ada beberapa kelompok masyarakat berwawasan lingkungan antara lain Layur, Payung Hijau Lestari, Mapan dan Bumiku.

Pengembangan hutan mangrove di Kota Pekalongan merupakan grand strategi lingkungan yang mendesak dilakukan mengingat semakin luasnya dampak banjir rob di permukiman wilayah pesisir, dan pemerintah Kota Pekalongan sendiri telah mempersiapkan lahan hutan mangrove dengan pembebasan lahan seluas 5,7 ha. Dimana sudah ada kegiatan yang mulai dilakukan berupa penanaman mangrove pada areal tambak pinggir pantai serta pinggir sungai, walaupun masyarakat belum optimal dalam pemeliharannya dan masih sebatas untuk mengurangi dampak banjir rob.

Tabel 16
 Profil perikanan budidaya air payau (tambak) Kota pekalongan tahun 2012.

NO	KEC. PEKL. UTARA	TAMBAK IDLE (HA)	TAMBAK DIKELOLA (HA)	KOMODITAS	LUAS (HA)	TEKNOLOGI	KET.
1.	DEGAYU	110	85	Bandeng Nila Udang Windu Udang Vanm.	50 10 10 5	Tradisional Tradisional Tradisional Semi Intensif	
2.	KRAPYAK LOR	65	65	Bandeng Nila Udang Windu Udang Vanm Polikultur Rmpt Laut Kepiting	42 5 10 5 2 1	Tradisional Tradisional Tradisional Semi Intensif Tradisional Semi Intensif	
3.	PANJANG BARU	-	20	Bandeng	20	Tradisional	
4.	KANDANG PANJANG	60	45	Bandeng Nila Polikultur rumput laut	32 3 10	Tradisional Tradisional Tradisional	
5.	BANDENGAN	107	83	Bandeng Nila Polikultur rmpt laut Kepiting	62 5 15 1	Tradisional Tradisional Tradisional Semi Intensif	
6.	PABEAN	45	35	Bandeng Nila Polikultur rmpt laut Kepiting	16 2 15 2	Tradisional Tradisional Tradisional Intensif	
	J U M L A H	387	333		333		

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan 2012

Tabel 17
 Profil sarana dan prasarana perikanan budidaya kota pekalongan tahun 2012.

NO	KELURAHAN	SARANA DAN PRASARANA	LUAS (PXL)M	KONDISI	TAMBAK (HA)	POTENSI(HA) (IDLE)	KETERANGAN
1.	DEGAYU	1. SUNGAI : - Sungai Banger (sudetan) - Sungai Gabus 2. SALURAN : - Saluran Primer - Saluran Tersier 3. JALAN : - Jalan Primer - Jalan Tersier	(2.238 x 70) m (1750 x 15) m (3.218 x 4) m (3.816 x 2) m (3.270 x 5) m (6.718 x 3) m	Baik Kurang/dangkal Kurang/dangkal Kurang/dangkal Baik Kurang/rusak	85	110	Luas Potensi merupakan lahan ex sawah yang terintrusi air laut. Sungai gabus sebagian masuk wilayah Kabupaten Batang Jalan tersier rusak terendam air rob.
2.	BANDENGAN	1. SUNGAI : - Meduri (Kab. Pekl) - Betingan 2. SALURAN : - Saluran Primer - Saluran Tersier 4. JALAN : - Jalan Primer - Jalan Tersier	(2.990 x 55) m (990 x 35) m (2.111 x 12) m (2.740 x 5) m (1.241 x 5) m (3.496 x 4) m	Baik Kurang/rusak Kurang/rusak Kurang/rusak Kurang/rusak Kurang/rusak	83	107	S. Meduri masuk wilayah Kab. Pekalongan. S. Betingan dan Saluran tanggul rusak sehingga tidak mampu menampung air rob. Jalan rusak (erosi)

3.	PABEAN	<p>1. SUNGAI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencongan - Meduri <p>2. SALURAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saluran Primer - Saluran Tersier <p>3. JALAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Primer - Jalan Tersier 	<p>(3.060x116) m (2.990 x 55) m</p> <p>(2.910 x 5) m (3.270 x 3) m</p> <p>(4.840 x 5) m (3.720 x 4) m</p>	<p>Baik Baik</p> <p>Kurang/rusak Kuang/rusak</p> <p>Baik Kurang/rusak</p>	35	45	<p>Sungai Pencongan dan sungai Meduri terletak di Kab. Pekalongan</p> <p>Saluran dan jalan tersier tambak rusak akibat erosi air rob.</p>
4.	KANDANG PANJANG	<p>1. SALURAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saluran Tersier <p>2. JALAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Primer - Jalan Tersier 	<p>(1.760 x 3) m</p> <p>(1.674 x 5) m (2.525x 3) m</p>	<p>Kurang/rusak</p> <p>Baik/aspal Kurang/rusak</p>	45	60	<p>sumber air tambak dari terusan saluran di Kel. Bandengan</p> <p>Jalan produksi rusak berat terendam rob</p>

5.	KRAPYAK LOR	1. SUNGAI : - Banger (folder) - Sibulan - Sigenteng 2. SALURAN : - Saluran Primer - Saluran Tersier 3. JALAN : - Jalan Primer - Jalan Tersier	(1.570 x 96) m (1.220 x 5) m (1.190 x 5) m (1.000 x 4) m (2.000 x 3) m (2.935 x 6) m (2.438 x 4) m	Dibangun folder Baik Kurang/rusak Kurang/rusak Kurang/rusak Kurang/aspal Kurang/rusak	65	65	Sudah ditangani DPU Provinsi Jawa Tengah.
6.	PANJANG BARU	2. SALURAN : - Saluran Tersier 3. JALAN : - Jalan Primer	(1.200 x 3) m (1.600 X 5) m	Kurang/rusak Baik/aspal	20	-	Sedang ditangani oleh DPU Provinsi Jawa Tengah Satker KLP

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan 2012

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

D. Rencana Induk Zonasi Kawasan Pesisir Kota Pekalongan

Zonasi kawasan pesisir dan laut adalah pengelompokkan suatu kawasan ke dalam zona-zona sesuai dengan kondisi fisik, potensi dan fungsinya. Tujuan penentuan zonasi adalah untuk mengoptimalkan fungsi ekologi dan ekonomi dari ekosistem suatu kawasan sehingga dapat dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan secara serasi, optimal dan berkelanjutan.

Zona peruntukkan pada kawasan pesisir dan laut umumnya dibagi menjadi dua kawasan. Pertama, yaitu zona kawasan konservasi/lindung yang merupakan zona pembatasan pemanfaatan sumberdaya dan atau zona pelarangan pemanfaatan sumberdaya (preservasi). Kedua, yaitu kawasan pemanfaatan yang umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu kawasan pemanfaatan umum, digunakan sebagai zona penangkapan, budidaya dan aktivitas pemukiman pesisir serta turunannya, dan zona pemanfaatan tertentu, digunakan untuk tujuan primer tertentu, misalkan pangkalan militer, pelabuhan beserta turunannya dan jalur koridor/ alur, digunakan sebagai jalur pipa dasar laut, jalur lintas kapal reguler maupun internasional, dan jalur migrasi ikan. Berdasarkan aturan tersebut, zonasi atau pemintakatan kawasan pesisir untuk Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi meliputi zona sempadan pantai, zona kenservasi pesisir, zona konservasi laut/terumbu karang dan zona polder/*long storage*

2. Kawasan Pemanfaatan

a. Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan pemanfaatan umum meliputi zona budidaya tambak, zona pertanian sawah, zona permukiman, zona wisata pantai/bahari, campuran (perdagangan dan jasa) zona pendidikan, zona pelayanan umum/perkantoran, kawasan lapangan olah raga/RTH, Zona Pemakaman, dan zona Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

b. Kawasan Pemanfaatan tertentu

Kawasan pemanfaatan tertentu berupa pelabuhan perikanan

c. Alur Laut

Selanjutnya pembagian kawasan Kota Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi meliputi kawasan-kawasan :

- a. **Kawasan sempadan pantai** yang ditetapkan dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan laut Kota Pekalongan adalah sepanjang pantai utara, mulai dari pantai Kelurahan Bandengan sampai Pantai Kelurahan Kandang Panjang serta di pantai Kelurahan Degayu. Wilayah sepanjang pantai tersebut telah mengalami abrasi yang cukup tinggi. Apabila tidak dilakukan rehabilitasi bakau sejak dini, maka proses abrasi di tempat tersebut akan terus terjadi, yang selanjutnya akan merugikan seluruh komponen, baik ekologi maupun ekonomi
- b. **Kawasan Konservasi pesisir** ditetapkan dengan memperhatikan lokasi—lokasi yang telah diarahkan dalam RTRW Kota Pekalongan 2007—2027 (daratan). Karena kondisi mangrove di pesisir pantai Kota Pekalongan sudah mengalami kerusakan yang hebat (kondisi kritis), maka rehabilitasi bakau diarahkan pada seluruh kawasan sepanjang sempadan pantai utara Kota Pekalongan atau seluruh kawasan sempadan pantai serta seluruh muara dan badan sungai besar.
- c. **Kawasan Konservasi Laut/Terumbu Karang**

Salah satu arahan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Pekalongan yang akan dilakukan adalah dengan menciptakan terumbu karang buatan yang berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembangnya ikan. Dengan upaya ini diharapkan akan semakin banyak ikan yang berhabitat di wilayah pesisir laut Kota Pekalongan.

d. Kawasan Polder / Long Storage

Ditetapkan lokasinya di Kelurahan bandengan dan Degayu. Fungsi dari Polder/Long Storage adalah untuk mengatasi banjir dan rob yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Mengingat fungsinya maka kawasan atau zona polder tersebut masuk dalam zona yang harus dilindungi.

2. **Kawasan Pemanfaatan Umum** suatu lingkungan kerja yang meliputi areal perairan daratan dan sarana-sarana yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan umum dan jasa guna memperlancar aktifitas umum, usaha perikanan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan produksi perikanan. Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi :

a. Kawasan Perikanan Budidaya Tambak

Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil perikanan tangkap adalah usaha budidaya tambak air payau. Salah satu maksud dan tujuan Kawasan budidaya tambak ini adalah menciptakan kawasan budidaya tambak yang produktif dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan dan dampak negatif terhadap ekosistem serta dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir Pekalongan. Berdasarkan data Bakosurtanal menyatakan bahwa tanah pesisir Kota Pekalongan kurang cocok untuk dijadikan lahan budidaya tambak. Namun demikian pihak Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan bekerjasama dengan Balai Besar Air Payau sudah berhasil mengembangkan budidaya udang vaname.

b. Kawasan Pariwisata Bahari

Kegiatan pariwisata dan rekreasi pesisir Pekalongan yang dikembangkan berupa wisata pantai di Pantai Pasir Kencana dan Slamaran, dan telah disusun rencana pengembangannya. Keberadaan wisata Pantai Slamaran yang kurang mendapat perhatian serius dalam pengembangannya, mengakibatkan kondisi pantai mengalami degradasi dan tidak tertata dengan baik. Melihat kondisi eksisting pantai dan beberapa kriteria persyaratan yang akan dijadikan objek wisata bahari, khususnya *master plan* wisata bahari, sebenarnya kurang mempunyai potensi yang tinggi dan kurang sesuai untuk dijadikan wisata pantai bahari. Hal ini terlihat jelas dengan kondisi pantai yang keruh, tidak terdapat keunikan dan tidak ada bentang alam yang indah, dan tidak ada variasi flora dan fauna yang ada. Kegiatan pariwisata dan rekreasi di kawasan pesisir akan mendapatkan dampak langsung bila terjadi penurunan kualitas kawasan pesisir dibandingkan kegiatan ekonomi lainnya mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama. Hal penting perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan kawasan kegiatan pariwisata dan rekreasi pesisir dan laut Kota Pekalongan adalah : Sirkulasi air yang baik, pengendalian limbah, dan tidak boleh merubah konfigurasi garis pantai alami

c. Kawasan Industri

Untuk mendukung salah satu strategi pengembangan perikanan tangkap Kota Pekalongan, yaitu pengembangan perikanan tangkap ke depan tidak lagi ditekankan pada peningkatan jumlah atau volume produksi, melainkan dengan upaya peningkatan nilai tambah produksi perikanan. Peningkatan nilai tambah produksi dilakukan dengan cara mulai mengembangkan industri-industri pengolahan perikanan, terutama industri-industri pengolahan hilir perikanan. Industri hilir perikanan dapat menghasilkan terasi,

ikan asap, ikan asin, ikan pindang, abon, dendeng ikan, kerupuk, baso ikan, pengelolaan limbah ikan sebagai kerajinan *home industry*. Arahkan lokasi pengembangan industri perikanan Pekalongan adalah di pusat utama pengembangan pesisir Pekalongan yaitu disekitar TPI dan PPNP.

d. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kota Pekalongan, khususnya di pesisir perlu diarahkan dan ditata sedemikian rupa sehingga tata ruang dan penggunaan lahan daerah permukiman sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sangat diperlukan karena untuk mengantisipasi dan membatasi berkembangnya daerah permukiman pesisir ke Kawasan-Kawasan yang seharusnya tidak dapat digunakan sebagai daerah permukiman Pesisir. Kawasan-Kawasan yang seharusnya tidak dapat digunakan sebagai daerah permukiman, seperti areal pertanian, tambak maupun mengarah ke daerah konservasi. Dengan diterapkannya Kawasan-Kawasan peruntukkan secara khusus sesuai dengan peruntukannya, maka permukiman pesisir diarahkan berada dibelakang daerah pertanian dan tambak serta dilarang berkembang ke arah Kawasan konservasi dan preservasi. Dengan demikian Kawasan-Kawasan tertentu akan lebih terjaga eksistensi, peran dan fungsinya, baik secara ekologi maupun ekonomi.

3. **Kawasan Pemanfaatan Tertentu Pelabuhan Perikanan TPI**, yaitu tempat pelelangan ikan yaitu suatu bangunan yang merupakan komponen PPI, dimana terjadinya kegiatan transaksi jual beli ikan antara nelayan sebagai produsen dan pedagang.

- Pengembangan PPI dan TPI diarahkan pada peningkatan PPNP dan TPI di Kota Pekalongan yang sudah ada.
- Pengendalian kualitas perairan wilayah pesisir, yaitu : a) Menjaga kelangsungan ekosistem laut dan pesisir, terutama daerah pemijahan dan daerah asuhan hewan laut seperti ikan, udang-udangan dan kerang. Daerah asuhan dan pemijahan yang terdapat di

Kota Pekalongan adalah hutan mangrove, yang juga berfungsi sebagai peredam pengaruh gelombang, menahan lumpur dan melindungi pantai dari erosi, gelombang pasang dan angin. b) Mengidentifikasi daerah pemijahan dan asuhan hewan laut seperti ikan, udang dan kerang-kerangan yang berada di Kota Pekalongan, mendeleniasi daerah yang telah teridentifikasi sebagai kawasan pemijahan dan asuhan dan memberlakukan daerah tersebut sebagai daerah *fish sanctuary*.

4. **Alur Laut** merupakan pengembangan Kawasan penangkapan ikan dari wilayah perairan Kota ke Kawasan pemanfaatan 12 mil dan Kawasan ekonomi eksklusif yang menimbulkan konsekuensi peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan khususnya kapal-kapal penangkapan ikan nelayan.

Alur Laut ini dibagi dalam zona-zoba dalam tabel berikut

Tabel 18. Zonasi Penangkapan ikan, Jenis Kapal , dan Alat Tangkap

Zona	Jenis Armada	Jenis Alat Tangkap
Zona Penangkapan 2 mil laut	Perahu tanpa motor Perahu motor tempel bermesin < 25 PK	Alat tangkap yang bersifat pasif: bubu, jaring insang, pancing
Zona Penangkapan 2-4 mil laut	Kapal motor < 5 GT	Alat tangkap pasif dan aktif : jaring insang, pancing rawai, perahu bagan
Zona Penangkapan 4-12 mil laut	Kapal motor 5-30 GT	Alat tangkap dan aktif : payang, dogol, pukot, pukot layang
Zona Penangkapan diatas 12 mil laut	Kapal Motor > 30 GT	Pukat, cincin, rawai dasar, rawai tunai, <i>gill net</i> .

(Sumber : Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Kota Pekalongan, 2012)

Secara keseluruhan pembagian Kawasan dalam Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Kota dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kelurahan Bandengan

Berdasarkan penyusunan zonasi Kota Pekalongan, wilayah Kelurahan Bandengan dapat dikelompokkan menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan konservasi seluas 20,7 ha dan Kawasan pemanfaatan umum seluas 206,6 ha. Kawasan konservasi yang masuk di Kelurahan Bandengan ini meliputi zona sempadan pantai/reklamasi seluas 6,7 ha dan kawasan konservasi pesisir 14 ha. Sedangkan kawasan pemanfaatan umum meliputi zona budidaya tambak seluas 172,6 ha, campuran perdagangan dan jasa 0,9 ha, permukiman 31,6 ha dan lapangan olah raga/RTH sebesar 1,5 ha.

2. Degayu

Berdasarkan penyusunan zonasi Kota Pekalongan, wilayah Kelurahan Degayu dapat dikelompokkan menjadi 2 kawasan yaitu kawasan konservasi seluas 9 ha, dan kawasan pemanfaatan umum seluas 328,5. Kawasan konservasi yang masuk di Kelurahan Degayu ini meliputi zona konservasi pesisir seluas 7 ha, dan kawasan polder 2 ha. Sedangkan kawasan pemanfaatan umum meliputi zona permukiman seluas 67,09 ha, tambak 19,84 ha, pertanian 222,3 ha, campuran (perdagangan dan jasa) 2,01 ha, industri 10 ha, wisata bahari 2,76 ha dan zona TPA sampah 4,5 ha.

3. Kandang panjang

Berdasarkan penyusunan zonasi Kota Pekalongan, wilayah Kelurahan Kandang Panjang dapat dikelompokkan menjadi 2 kawasan yaitu kawasan konservasi seluas 34,25 ha dan kawasan pemanfaatan umum seluas 126,25 ha. Kawasan konservasi yang masuk di Kelurahan Kandang Panjang ini meliputi zona sempadan pantai seluas 10 ha, konservasi pesisir 19,75 ha dan polder/long storage 4,5 ha. Sedangkan kawasan pemanfaatan umum meliputi zona permukiman seluas 65,72 ha, tambak 38,12 ha, campuran (perdagangan dan jasa) 8,89 ha pendidikan 4,51 ha, pelayanan umum 5,31 ha dan kawasan lapangan olah raga/RTH seluas 3,7 ha. Luas zona konservasi yang terdapat di Kelurahan Kandang Panjang ini adalah 14,38, sementara zona pemanfaatan umum meliputi lahan seluas 177,99 ha.

4. Krapyak lor

Berdasarkan penyusunan zonasi Kota Pekalongan, wilayah Kelurahan Krapyak Lor dapat dikelompokkan menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan konservasi seluas 6,92 ha, kawasan pemanfaatan umum seluas 253,98 ha, dan kawasan pemanfaatan tertentu seluas 50,80 ha. Kawasan konservasi yang masuk di Kelurahan Krapyak Lor ini berupa zona *polder/long storage* seluas 6,92 ha. sedangkan kawasan pemanfaatan umum meliputi zona permukiman seluas 70,22 ha, tambak 121,04 ha, sawah 29,53 ha, wisata bahari 12,20 ha, campuran (perdagangan dan jasa) seluas 13,11 ha, industri 5,2 ha dan lapangan olahraga/rth 2,68 ha. Adapun kawasan pemanfaatan tertentu berupa pelabuhan perikanan seluas 50,80 ha.

5. Panjang Baru

Berdasarkan penyusunan zonasi Kota Pekalongan, wilayah Kelurahan Panjang Baru dapat dikelompokkan menjadi 2 kawasan yaitu kawasan konservasi dan kawasan pemanfaatan umum. Kawasan konservasi yang masuk di Kelurahan Panjang Wetan ini berupa zona sempadan pantai, sedangkan kawasan pemanfaatan umum meliputi permukiman, campuran (perdagangan dan jasa), wisata bahari, pendidikan dan makam. Luas kawasan konservasi yang terdapat di Kelurahan Panjang Baru adalah 13 ha. Sementara zona pemanfaatan umum meliputi lahan seluas 89,63 ha.

6. Panjang wetan

Berdasarkan penyusunan zonasi Kota Pekalongan, wilayah Kelurahan Panjang Wetan dapat dikelompokkan menjadi 3 kawasan yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi dan kawasan tertentu. Kawasan pemanfaatan umum meliputi lahan seluas 135,87 ha, Kawasan konservasi seluas 3,7 ha, sedangkan kawasan pemanfaatan tertentu berupa pelabuhan perikanan meliputi area seluas 9,5 ha.

7. Zonasi wilayah laut

Zona alur laut meliputi wilayah laut seluas 377.352,034 m² (37,74 ha). Zona khusus merupakan kawasan pantai yang direklamasi untuk pembangunan pelabuhan perikanan meliputi kawasan seluas 697.789,707 m² (69,78 ha), sedangkan zona konservasi meliputi kawasan seluas 491.441,478 m² (49,14 ha) yang merupakan kawasan yang akan di reklamasi. Sedangkan zona pemanfaatan umum meliputi kawasan seluas 35.001.261,758 m² (3.500,01 ha) terdiri dari jalur penangkapan IA seluas 21.347.525,485 m² (2.134,75 ha), Jalur penangkapan IB seluas 5.333.772,558 m² (533,38 ha), daerah pariwisata seluas 84.594,680 m² (8,46 ha) dan daerah penangkapan bagi nelayan tradisional seluas 8.235.369,035 (823,54 ha)

E. Rencana Induk (Masterplan) Kawasan Minapolitan

Pembangunan Minapolitan sebagai salah satu strategi pembangunan yang berbasis perikanan, memerlukan pedoman yang akan menjadi penentu bagi penataan ruangnya. Pengembangan kawasan minapolitan Kota pekalongan merupakan pengembangan minapolitan berbasis perikanan tangkap, yang lokasinya berada di kawasan pesisir. Oleh karena itu dalam penyusunan rencana induk (masterplan) juga harus merujuk kepada Rencana Induk Zonasi Kawasan Pesisir. Penyusunan masterlan zonasi kawasan pesisir Kota Pekalongan sudah disusun dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 maupun Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Kota Pekalongan. Tentunya tidak semua arahan yang ditetapkan dalam RT/RW dapat diakomodasi seluruhnya, akan tetapi dipertimbangkan juga kondisi mikro struktur ruang wilayah pesisir di Kota Pekalongan

Adapun gambaran struktur ruang dalam Rencana Induk kawasan Pesisir adalah sebagai berikut:

1. Pola Guna Lahan Kawasan Pesisir.

Pola penggunaan lahan di kawasan pesisir Kota Pekalongan diklasifikasikan menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan inti yang merupakan wilayah operasional Pelabuhan Perikanan

Nusantara Pekalongan (PPNP) dengan kelengkapannya dan kawasan pendukung, yaitu bagian dari Kota Pekalongan utara khususnya, dengan aktivitas utama adalah pada kegiatan perikanan.

a. Kawasan Inti.

Proyeksi jangka menengah, (5 tahun) kedepan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dengan pelabuhan di sisi timur muara S. Pekalongan dan di tepi Laut Jawa (*on-shore*) secara bertahap sudah beroperasi. Kawasan operasional pelabuhan ini merupakan kawasan atau zona inti minapolitan yang akan berada disebelah barat dan timur muara dengan luas keseluruhan hampir 5 Ha. Kawasan inti diusulkan mempunyai tipe pengelolaan semi privat, khususnya pada pengelolaan jaringan utilitas dan prasarana (contoh: listrik dari PLN, namun juga memiliki daya sendiri, yaitu disel ataupun genset).

1) Elemen-elemen kawasan inti.

Elemen yang harus disediakan pada kawasan inti sebagai fungsi pelabuhan perikanan tangkap, yaitu:

- a) Kolam dan dermaga, tempat kegiatan kapal-kapal datang (*dropping*) dan pergi (melaut) ataupun tempat bersandar sementara (parkir), di mana area ini berhadapan langsung dengan Laut Jawa, dengan perantara kolam pelabuhan sebagai area perairan tenang/bebas ancaman gelombang laut.
- b) Tempat pelelangan ikan (TPI) dengan kelengkapan kegiatan, seperti kantor pengelola/perkantoran, ruang kemas/gudang, ruang cuci, ruang transisi, perparkiran, ruang bongkar/muat, dsb. TPI tersebut dapat dipilahkan antara TPI umum dan TPI khusus (pola-bersih/sehat).
- c) Gudang logistik dan pengepakan, dan gudang muat logistik, berdekatan dengan TPI.

- d) Ruang pendinginan, dan penggaraman sekaligus berdekatan dengan pabrik/pembuatan ys. batu.
- e) Dok, tempat perbengkelan kapal, dengan kelengkapan fasilitasnya.
- f) Rumah boro, dan kelengkapannya sebagai fasilitas tempat tinggal sementara nelayan dari luar Pekalongan.
- g) Ruang terbuka/penjemuran/tempat evakuasi bencana
- h) Mal perikanan
- i) Balai/klinik kesehatan
- j) Ruang sempadan S. Pekalongan yang berupa tatanan pepohonan dan pelataran/perkerasan.
- k) Rumah pompa, diesel/genset dan perbengkelan ringan/kering.
- l) Perumahan khusus pengelola
- m) Tempat-tempat penting lainnya sebagai fasilitas kegiatan sehari-hari, antara lain: kios BBM, MCK, peribadatan, kantin, pos jaga, tempat penjemuran jala, tempat istirahat, olah raga. berkumpul, menara air, tempat penyuluhan, laboratorium, IPAL, gardu-listrik, area perparkiran, RTH, tempat hentian kendaraan umum Kota, pos jaga dan TPST.

Rangkaian elemen-elemen tersebut diatas, sudah dipersiapkan lahan di tepi sisi timur S. Pekalongan memanjang ke selatan, sehingga dalam penataan bangunan dan lingkungan akan membentuk suatu kawasan yang berhadapan langsung dengan S. Pekalongan (Water-front). Harapannya adalah, kawasan inti ini tidak saja sebagai pusat kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan, tetapi dapat mewujudkan citra Kota Pekalongan yang berciri khas dengan menampilkan bangunan arsitektur ciri-ciri Jawa Tengah baik bangunan gedung ataupun bangunan gapuro.

2) Prasarana dan utilitas kawasan inti.

a) Jaringan jalan.

Fungsi jalan yang direncanakan ada 2 (dua), yaitu fungsi jalan di dalam kawasan dan jalan penghubung kawasan dengan luar (pusat Kota, daerah lain).

Jalan lingkungan, merupakan prasarana transportasi untuk kegiatan didalam kawasan sendiri, yaitu antar elemen-elemen kawasan inti minapolitan. Secara garis besar jalan tersebut sebagian sudah termasuk pada perencanaan review master plan PPNP dari Dit.jen perikanan tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan TA 2011. Namun demikian dalam mewujudkan rencana tata bangunan dan lingkungan jalan lingkungan ini perlu ditampilkan tidak sekedar wadah kegiatan lalu-lintas saja, namun juga sebagai sarana memperindah kawasan, seperti adanya *boulevard*, *street-furniture*, lampu hias penerangan jalan,

Jalan penghubung, merupakan jalan Kota untuk menghubungkan kawasan inti dengan pusat Kota ataupun daerah belakang yang berpengaruh (*hinter-land*), dan mempunyai peran sebagai kolektor sekunder.

- Dalam jangka menengah dapat meningkatkan kualitas jalan Slamaran - Gajahmada dan Jl. Jlamprang (lewat Kl. Krapyak Lor) sebagai penyelesaian sementara.
- Peningkatan jalan ke timur (lewat tempat rekreasi Slamaran): sampai TPA, ke selatan Jl. Sumur Pantau I, - Jl. Patimura (lewat Kl. Degayu), yang seterusnya bertemu dengan jalan regional/arteri primer ke arah Batang.
- Peningkatan dan pembangunan jalan baru, yaitu peningkatan jalan inspeksi sisi barat S.Sudetan, terus menyusuri samping sungai ke

arah selatan dan akhirnya bertemu dengan jalan regional/arteri primer ke arah Batang. Jalur ini lebih realistis dan penyelesaian yang lebih murah, sedikit masalah sosial.

- Dalam jangka panjang, dengan terwujudnya jalan arteri primer yang melintas kawasan pesisir, maka kedua jalan tersebut diatas dapat dihubungkannya, dan apabila dimungkinkan dengan persimpangan tidak sebidang.

Jalan perairan, komplek fasilitas PPNP, dapat dipastikan juga berlalu- lintas dengan prasarana air (S. Pekalongan). Untuk itu perlu sarana dan prasarananya.

b) Jaringan Listrik dan penerangan jalan kawasan.

Keberadaan tenaga listrik dengan kelengkapan gardu listrik skala kawasan dari PLN tetap diperlukan bagi utilitas kawasan inti, namun persediaan atau cadangan yang dikelola sendiri harus di sediakan (genset/disel).

Khusus penerangan jalan/lingkungan kawasan inti, dapat dilakukan dengan penerangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), suatu tindakan yang tidak bergantung dari PLN.

c) Jaringan Air Bersih.

Penyediaan air bersih dilaksanakan dengan membuat jaringan PDAM, dan pembuatan sumur dalam atau penetralan air laut. Untuk itu perlu disediakan ruang untuk perangkat instalasi air bersih

d) Jaringan Air Kotor/limbah.

Ada 3 (tiga) macam limbah utama yang dihasilkan oleh kawasan inti yaitu:

- Limbah ikan, merupakan ikan yang diapkir dan air sentoran pembersihan dari TPI.
- Limbah manusia (dari MCK), atau limbah rumah tangga/domestik.
- Limbah minyak, khususnya dari dok atau perbengkelan

Limbah-limbah ini harus dikelola, dengan pengaliran ke bak-bak kontrol dan dengan sistem grafitasi yang masing-masing diperlukan utilitas IPAL. Penempatan masing-masing IPAL disarankan di tanam pada jalur sempadan Sungai. Pekalongan, dengan pengontrolan secara periodik sehingga air sungai dapat berkualitas baik.

e) Jaringan pengelolaan air hujan.

Banjir rob merupakan salah satu masalah yang selalu terjadi setiap tahun, selain karena adanya genangan air pasang dari lautm curah hujan pada musim tertentu ikut memperparah situasi banjir. Pematangan/pengurugan lahan kawasan inti yang dilakukan adalah solusi yang baik. Dengan demikian pengaliran air hujan dapat dilakukan dengan lancar dan sehat. Air hujan tidak dialirkan langsung ke sungai/laut, tetapi perlu dikelola terlebih dahulu. Pada kasus ini, perlu ada penampungan yang berwujud kolam permanen sebagai penyejuk dan pemerindah kawasan, sekaligus persediaan air pemadaman kebakaran. Jaringan saluran berada di sisi jaringan jalan, dan sebelum masuk ke sungai perlu utilitas bak-bak pengontrolan dan penyaringan yang dapat ditanam pada jalur sempadan S. Pekalongan.

Kawasan inti perlu mengakomodasi jaringan air hujan Kota bagian timur. Keberadaan pompa air banjir di timur kawasan perlu dijadikan satu kesatuan pengelolaan dengan kawasan inti, karena saluran pengaliran airnya akan menembus kawasan inti, sehingga sistem air hujan lingkungan dan Kota dapat dijaga fungsinya secara berkesinambungan.

f) Jaringan komunikasi

Jaringan kabel telepon dari PT. Telkom, dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas komunikasi di kawasan inti, selain penggunaan telepon seluler. Keberadaannya tidak berpengaruh terhadap kewujudan kawasan.

g) Pengelolaan sampah.

Dapat dipastikan produksi sampah dari kawasan ini, akan melimpah setiap harinya, seperti: sisa-sisa ikan (busuk, potongan), plastik, keranjang, kertas, dsb. Selain sampah padat dan akan berbau juga. Untuk itu perlu disiapkan semacam TPS-TPS di TPI, dan sebuah TPST khusus di dekat jalan kolektor agar armada truk sampah Kota mudah menjangkaunya.

h) Jaringan gas.

Sesuai dengan RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, di sisi selatan pantai ada rencana jaringan utilitas penting yaitu gas. Dengan demikian kawasan inti perlu mengakomodasinya. Adanya jalan lingkungan yang menerus dari barat ke timur (bisa dengan material konblok), maka di bawah rumija-nya dapat dibuat penanaman pipa gas sebagai antisipasinya.

i) Jaringan air pemadaman kebakaran

Komplek PPNP, untuk mendapatkan air bagi pemadaman kebakaran bukan masalah, karena persediaan air (air laut) melimpah. Namun demi perawatan peralatan dan kepraktisan, diseyogyakan tersedia jaringan pipa air bersih guna pasokan air pemadaman kebakaran dengan kelengkapan fire hidrank pile, yang diletakkan pada tempat- tempat strategis.

j) Tiang-tiang penangkal petir.

Guna mengantisipasi adanya bahaya petir (mengingat letak kompleks PPNP terbuka di pantai), maka perlu adanya penangkal petir. Untuk efisiensi penggunaan dan dapat menjangkau area yang cukup luas, maka dapat digunakan tiang-tiang tinggi dimana ujungnya diberi elemen penangkal petir.

2. Pola Guna Ruang Kawasan Pendukung.

Secara keruangan, yang dimaksud dengan kawasan pendukung adalah mencakup enam kelurahan (Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang Wetan, Krapyak Lor dan

Degayu), di mana semua kelurahan tersebut memiliki pantai dengan panjang total 6,15 Km. Dalam pengendalian keruangan perlu garis ruang atau jalur sempadan pantai bagi pengamanan kegiatan di darat. Penggunaan ruang atau lahan, seterusnya bagi menata pengelompokan kegiatan (zonasi) telah diatur dengan Perda No.4 Tahun 2010, yaitu dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

- Pertimbangan ekologis
- Pertimbangan penggunaan lahan existing
- Pertimbangan kesesuaian lahan
- Pertimbangan kebijakan sector perikanan, dan
- Pertimbangan sosial ekonomi budaya.

Dalam rangka penataan lebih lanjut (zonifikasi) lebih terperinci, aspek-aspek yang terdiri dari rencana jalan arteri primer dan garis besar pada RTRW Kota Pekalongan 2019-2029, dimasukkan kedalam pertimbangan penyusunan master plan. Dengan kepastian adanya jalur arteri primer, berarti dapat dijadikan sebagai pembatas zona secara tegas, antara selatan jalan arteri dengan sisi utaranya. Demikian juga keberadaan ruang terbuka hijau akan lebih jelas keberadaannya seiring dengan pengamanan jalan arteri tersebut. Sedangkan RTRW merupakan panduan dalam menentukan zonafikasi di kawasan pendukung minapolitan.

a. Zona Peruntukan Industri Pengolahan Perikanan.

Mengingat situasi dan kondisi geografis kawasan pesisir dibelah oleh sungai (S.Pekalongan), maka pembahasan di bagi menjadi dua bagian. Pengembangan zona perikanan budidaya adalah zona pendukung minapolitan dengan pengembangan minapolitan berbasis perikanan budidaya meningkatkan perekonomian: dempond udang Vaname; Pembangunan saluran tambak; Pembangunan jalan produksi tambak; dan Pengembangan dempond budidaya system polyculture dan pen culture

1) Zona peruntukan industri perikanan di kawasan bagian barat.

Dengan dasar pertimbangan dan khususnya penggunaan lahan existing, kesesuaian lahan serta kebijakan sektor perikanan, maka zona peruntukkan industri pengolahan ikan berada di :

- Lahan terbuka sebagai tempat penjemuran ikan dan prosesnya, seperti di Panjang Baru dan Panjang Wetan.
- Lahan terbuka berair (di Bandengan dan Kandang Panjang).

Peruntukkan industri pengolahan perikanan disini memang berdekatan dengan tambak-tambak yang sudah ada dan pengembangannya. Namun rencana ini perlu dievaluasi setiap saat seiring dengan evaluasi RTRW Kota, yaitu pada tahun 2014, 2019, 2024, 2029 dan seterusnya. Pada akhir rencana (RTRW-2029) zona pengolahan tersebut di selatan rencana jalan arteri primer diperuntukkan sebagai perumahan dengan kepadatan rendah. Penjelasan di atas berarti, saat sekarang sampai 2 tahapan kedepan (2024) masih diizinkan untuk memanfaatkan sebagai pengolahan perikanan, namun terbuka bagi warga untuk membangun rumah/perumahan di sana dengan kaedah-kaedah kelayakan sebagai perumahan (proses pengeringan dan peninggian/pemadatan lahan perlu dilakukan).

Mengingat keterbatasan lahan seiring dengan berjalannya waktu, maka proses industri perikanan masyarakat perlu di modernkan, sehingga efisiensi tenaga, waktu dan biaya dapat di tekan dan perkembangan pendapatan dapat ditingkatkan. Untuk itu pemerintah (pusat/Kota) perlu memberikan latihan dan pendidikan dan motivasi kepada masyarakat petani perikanan. Perlindungan keberadaan industri perikanan di kawasan ini perlu mendapatkan perlindungan dari pemkot, mengingat potensi kegiatan perKotaan lainnya sangat strategis bila dikembangkan pada kawasan tersebut, seperti perumahan, pertokoan, dsb.

2) Zona peruntukan industri perikanan di kawasan bagian timur.

Kepindahan PPNP di seberang timur S.Pekalongan akan membawa konsekuensi logis dari pada kawasan pendukungnya, seperti kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan, karena tuntutan kemudahan kegiatan dengan PPNP. Pada RTRW telah diarahkan zona perikanan tangkap berada di ruang terbuka (tambak-tambak) di Kelurahan Degayu dan Krapyak Lor. Dengan demikian zona peruntukan industri perikanan berada di dalamnya.

b. Zona Peruntukan Perumahan.

Kawasan pendukung selain berfungsi untuk mendukung kegiatan minapolitan juga merupakan bagian dari perKotaan Pekalongan, Oleh karena itu zona peruntukan perumahan dapat dipilah antara dominasi perumahan bagi nelayan dan perumahan umum Kota pada umumnya.

1) Perumahan Nelayan.

Sesuai dengan beberapa pertimbangan yang telah ditulis pada prolog butir 5.2, maka perumahan nelayan berada di Kl. Bandengan-selatan, Kandang Panjang-selatan, dan Panjang Baru-utara untuk pesisir bagian barat. Sedangkan pesisir bagian timur, berada di tepian S. Pekalongan Krapyak Lor, dan sebagian dari Kelurahan Degayu.

2) Perumahan Umum.

Perumahan ini berada di tempat-tempat yang lebih strategis, seperti pada jalan-jalan Kota, ataupun di daerah pedalaman yang pada umumnya dibangun oleh pengembang, seperti di perumahan Slamaran, termasuk rumah susun di Krapyak Lor. Kepadatan bangunan yang diperkenankan adalah kepadatan rendah sampai sedang dan berlaku baik di bagian barat maupun timur kawasan pesisir. Keberadaan rumah susun perlu disosialisasikan, sehingga pembangunan rumah susun dikemudian hari dapat direalisasikan, seperti rumah susun di

Krapyak Lor. Dengan rumah susun maka akan didapatkan ruang terbuka hijau yang besar, prasarana/utilitas lebih berkualitas dan dapat menghindari banjir/rob yang kadang-kadang datang mendadak dan dalam waktu yang lama.

c. Zona Kawasan Cagar Budaya (KCB).

Potensi bangunan-bangunan lama dan memiliki nilai arsitektur, adanya ruang terbuka taman/lapangan Jetayu, serta tata letak yang strategis di pusat Kota, maka di sekitar Lapangan Jetayu dan bangunan Museum Batik, gereja serta bangunan lain yang memiliki daya arsitektur ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.

d. Zona Ruang Terbuka Hijau.

Bagi memenuhi tuntutan fasilitas lingkungan dan besaran RTH Kota minimal 30%, maka ruang terbuka yang ada tetap dipertahankan, seperti lapangan Jetayu, lapangan sepak bola di Panjang Baru; Kandang Panjang. Pengembangan kegiatan yang didominasi kehijauan, seperti pengembangan tempat rekreasi Slamaran, tempat pemakaman dan jalur hijau sempadan sungai dan pantai, pertamanan di lahan ex. TPI, serta hutan mangrove. Pengembangan Pusat Informasi Mangrove (PIM) pada lahan rehabilitasi hutan dan lahan yang akan dikolaborasikan dengan pengembangan ekowisata dan serta pembangunan *polder/long storage*. Jalur hijau pengamanan rencana jalan arteri juga merupakan kebutuhan kawasan demi keserasiannya.

Sedangkan ruang terbuka hijau privat, yang berwujud halaman atau pekarangan rumah, perkantoran tetap diperlukan dan dipelihara. Untuk itu perijinan pambangunan selalu diatur keharusan adanya ruang terbuka hijau, yaitu dengan pengetatan KDB berkisar minimal 80%.

e. Zona Peruntukan tercampur

Zona tercampur adalah lingkungan yang terdiri dari berbagai jenis bangunan, namun antara satu kegiatan dengan yang lain tidak saling terganggu. Zona ini berada di sekitar antara Jl. Progo – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Kusuma Bangsa dengan Jl. WR. Supratman. Tata letak berbagai jenis bangunan yang telah mapan dapat dipertahankan, seperti :

- 1) Fasilitas pendidikan : SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi (STAIN). Hanya saja fasilitas pendidikan favorit yang berdampak pada kemacetan perlu di evaluasi, dan pengetatan pemberian IMB dengan disertai peraturan zonasi yang mengikat, sehingga dampak negatif dapat dihindarkan.
- 2) Fasilitas pemerintah/negara, seperti kantor kecamatan, kelurahan, kantor pemerintah dan swasta, perbankan, lembaga pemasyarakatan, Polsek, Kodim.
- 3) Fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, RS Budi rahayu, RS paru-paru.
- 4) Industri, bagi industri ringan, tenaga kerja sedikit, tidak berpolutan (cair, padat, gas) yang sudah berdiri dapat dipertahankan dengan beberapa catatan sesuai dengan peraturan zonasi yang berlaku, atau yang akan dibuat.
- 5) Perumahan, dan perumahan berfungsi ganda, seperti ruko, rukan, bahkan industri ringan masih diperkenankan dengan syarat-syarat tertentu yang di atur dalam peraturan zonasi.
- 6) Perumahan – industri batik, yang sudah ada, perlu disyaratkan untuk memiliki IPAL, sedangkan pembangunan baru tidak diperkenankan.

f. Komplek Industri Perikanan.

Ada dua komplek industri dengan skala besar yaitu Blu Sky Industry di Panjang Wetan dan Maya food industri di Krapyak Lor. Selama kegiatan tersebut mendukung kegiatan perikanan masih dapat dipertahankan. Pengembangan ataupun pembangunan baru industri

semacam ini dapat dilaksanakan dengan tempat yang sudah disediakan yaitu pada zona peruntukkan industri pengolahan perikanan di Kelurahan Krapyak Lor dan Degayu.

g. Kawasan Rekreasi.

Ada tiga tempat yang telah ditetapkan sebagai kegiatan rekreasi di kawasan pesisir, yaitu :

1) Komplek rekreasi Pasir Kencana.

Komplek rekreasi bahari “Pasir Kencana” sudah berjalan lama sampai sekarang, dan akan ditingkatkan koleksi hiburan sebagai destinasi pariwisata, terletak di sebelah barat kawasan inti.

2) Komplek rekreasi Slamaran

Sebuah komplek hiburan pantai di timur kawasan inti yang akan dikembangkan dan ditingkatkan kualitas destinasi sebagai tempat hiburan berbasis perairan pantai bagi warga masyarakat Kota maupun regional.

3) Rencana Hutan Mangrove

Hutan mangrove sebagai usaha menahan abrasi dan pengembangan kehidupan ikan secara alami, penahan banjir rob, sebagai penambah kebutuhan RTH Kota Pekalongan terletak di Kelurahan Bandengan utara diupayakan juga sebagai kawasan wisata (eko wisata berbasis mangrove). Selain sebagai tempat rekreasi mangrove juga berfungsi lain. Guna pengamanan kerusakan pantai yang terjadi terus menerus, maka perlu usaha konservasi pantai.

- Perintisan hutan mangrove, sosialisasi dan pengembangan sebagai tempat rekreasi, perlindungan rob, RTH dan kegiatan silfishery.
- Pengembangan budi daya perikanan
- Polder/long storage, pembangunan penahan abrasi seperti revertment ataupun reklamasi pantai.

— Pengelolaan air hujan.

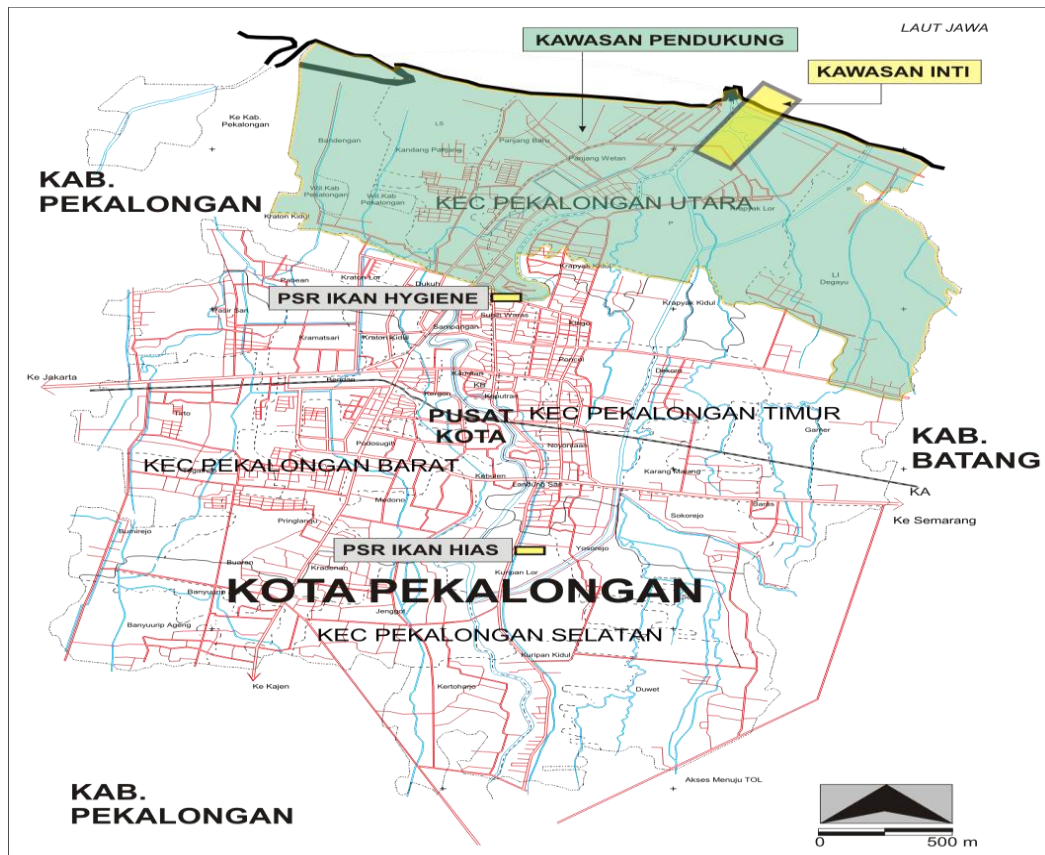
4) Komplek PPNP

Saat sekarang, rencana pemindahan PPNP dari barat sungai ke timur sungai hanya sebagai revitalisasi kegiatan perikanan saja. Namun sebenarnya keberadaan PPNP dapat di jadikan sebagai destinasi pariwisata berbasis kegiatan perikanan (penangkapan, pelelangan, pengolahan). Sehingga desain komplek PPNP perlu dimasukan ide kearah pariwisata artinya jiwa “sapta-pesona” perlu dijiwai dan dilaksanakan oleh *stakeholder* PPNP.

h. Komponen Minapolitan di luar Kawasan

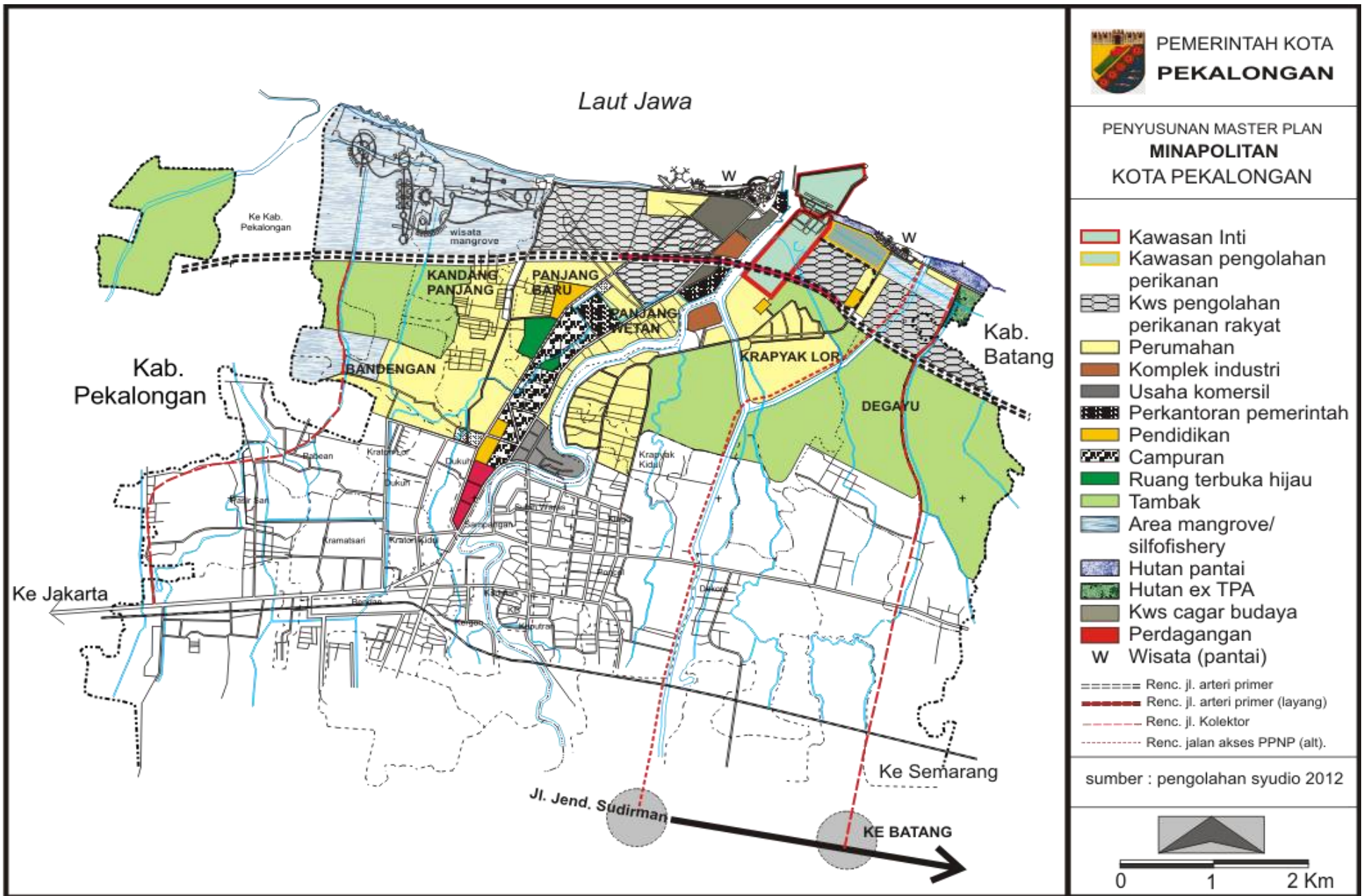
Terdapat dua komponen minapolitan yang terletak diluar kawasan pesisir yaitu:

- Pasar ikan *hygiene* di Jl. Pati Unus
- Pasar ikan hias, di dekat persimpangan Jl. HOS Cokroaminoto dengan Jl. Yosorejo (makam cina)



Gambar 5. Peta Komponen Minapolitan

(Sumber : Laporan Akhir Minapolitan, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2012)



Gambar 6. Peta Penyusunan Masterplan Minapolitan Kota Pekalongan

F. Pelaksanaan Program Pembangunan Minapolitan, Capaian dan hambatannya

Program pembangunan Minapolitan Kota Pekalongan diluncurkan pada tanggal 01 April 2011, oleh Dedi Sutisna, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan yang waktu itu dijabat oleh Ir. Fadel Muhammad di TPI Pekalongan.

Program Pembangunan Kawasan Minapolitan ini merupakan program lintas sektoral yang melibatkan beberapa unsur yaitu :

- Kementerian Keuangan
- Kementerian Kesejahteraan Rakyat
- Kementerian Industri/Perdagangan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian ESDM
- Kementerian Pertanian
- Kementerian BUMN
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kementerian LH
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementrin Koperasi dan UKM
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pembanguna Daerah Tertinggal
- BKPM
- Bappenas
- BPN
- TNI/Polri

- Kadin
- Pelaku Usaha
- PT. Pertamina

Pelaksana utamanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan dan Pemerintah Kota pekalongan yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah.

Oleh karena sifatnya yang lintas sektor maka diperlukan usaha keras dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan untuk dapat berkomunikasi dengan sector-sektor terkait dalam upaya melaksanakan program Minapolitan ini.

Kegiatan pengembangan minapolitan terdiri dari 2 (dua) jenis kegiatan yaitu : (1) Kegiatan fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana serta penyediaan lahan; (2) Kegiatan Non Fisik meliputi kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan Nelayan, penyediaan kapal-kapal tangkap dengan kapasitas 80 grosston untuk para nelayan, pensertifikatan tanah untuk perumahan dan tambak nelayan, serta upaya-upaya peningkatan SDM Nelayan

1. Kegiatan Fisik

Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan kawasan minapolitan dapat disajikan dalam daftar pada tabel berikut :

Tabel 19. Program Master Plan
Kawasan Minapolitan Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2017

Program	Alternatif Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Leading Instansi
			1	2	3	4	5		
1. Jalan akses PPNP ke Jl. Utama Kota	Peningkatan dan pembangunan Jalan baru								
2. Pondok Boro/ rumah andon	Peningkatan dan pembangunan Jalan baru								
Kawasan Pengolahan Perikanan									
3. Cold Storage	Pembangunan baru						APBN, APBD	P2HP	
4. Sentra Pengolahan	Pembangunan baru						APBN, APBD	DPPK Masy.	
5. Rumah Kemas/ dan los pasar	Pembangunan baru						APBN, APBD	DPPK, DPU Masy.	
6. Instalasi Air bersih pengolahan ikan	Pembangunan baru						APBN, APBD	DPPK, DPU	
7. Infrastruktur jalan lingk. Industri pengolahan ikan	Peningkatan dan Pembangunan baru						APBN, APBD	DPPK, DPU	
8. Saluran Limbah pengolahan ikan	Peningkatan dan Pembangunan baru						APBN, APBD	DPPK, DPU	
9. IPAL Limbah pengolahan ikan	Peningkatan dan Pembangunan baru						APBN, APBD	DPPK, DPU	
10. Mall Perikanan									
Kawasan Budidaya Perikanan									
11. Jalan Produksi tambak *)	Peningkatan kualitas jalan Kelengkapan talud jalan, Jembatan	Di Bandengan 2 jalan					APBN, APBD	DPPK, DPU Masy.	
		Jl. Kunthi dan Di dlm mangrove					APBN, APBD	DPPK, DPU-CK	
		Di kedua sisi S.					APBN, APBD	DPPK, DPU-CK	

Program	Alternatif Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Leading Instansi
			1	2	3	4	5		
		Sibulan							
		4 jalan di timur S.Sibulan					APBD	DPPK, DPU-CK	
12 Saluran tambak *)	Peningkatan dan pembuatan baru	Bandengan dan Kd. Panjang					APBD	DPPK, SDA	
		Krapyak Lor					APBD	DPPK, SDA	
		Degayu					APBD	DPPK, SDA	
13 Silfishery area	Pengembangan	Bandengan					APBN, APBD	DPPK, SDA	
Kawasan Permukiman									
14 Infrastruktur jalan permukiman pesisir/nelayan	Peningkatan dan pembangunan jalan baru	Bandengan, Kd. Kandang, Pj. Wetan. Pj.Baru					APBD	DPPK, DPU	
		Krapyak Lor					APBD	DPPK, DPU	
		Degayu					APBD	DPPK, DPU	
15 Instalasi Air bersih nelayan	Pembangunan baru						APBN, APBD	DPPK, SDA	
16 Saluran drainasi *)	Peningkatan dan Pembangunan baru						APBN, APBD	DPPK, SDA	
17 IPAL industri batik	Pembangunan baru						APBD. masy.	DPPK, Masy.	
18 Sarana pendidikan	Pembangunan baru						APBD	Din.pddk Masy.	
19 Sarana kesehatan	Pembangunan baru						APBD	Din.Kes, Masy.	
Kawasan Konservasi Pantai									
20 Pusat Informasi Mangrove dan silfishery	Pengembangan	Bandengan Dm Kandang Panjang					APBD	SDA	
21 Kawasan Budidaya Perikanan	Pengembangan						APBD, APBN	DPPK	

Program	Alternatif Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Leading Instansi
			1	2	3	4	5		
22 Polder/long storage	Pengembangan	Bandengan						APBD, APBN	DPU SDA
23 pemeliharaan pantai	Pengembangan							APBD, APBN	DPU SDA
24 Saluran drainasi *)									DPU SDA
25 Wisata Mangrove	Pengembangan	Bandengan Kd. Panjang							SDA, KHTAN AN
LAIN-LAIN									
1. Perencanaan site Kws pengolahan perikanan									DPPK
2. Rumah Susun	Studi kelayakan	Bandengan dan Kd. Panjang						APBD APBN	Dinrum Menpera

Sumber : Laporan Akhir Penyusunan MasterPlan Minapolitan Kota Pekalongan, 2012 yang dikeluarkan DPPK Kota Pekalongan)

Adapun program jangka pendek tahun 2012/2013 dengan dukungan sector tertentu dan capaian yang telah didapatkan dalam proses pembangunan Minapolitan adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Program Kerja Jangka pendek (2013/2014) dan Realisasi Cipta Karya Kementerian PU dalam pengadaan Infrastruktur di Zona Inti dan Zona Pendukung.

No	Kegiatan	Volume	(RP.000)	DED	RPIJM
ZONA INTI					
1	Tempat Pelelangan Ikan	1	6.500.000	Sudah	Sudah
ZONA PENDUKUNG					
2	Pergudangan di Slamaran	1	-	-	-
3	Rumah singgah nelayan andon di Slamaran	1	1.100.000	Th 2013	Sudah
4	Lantai Jemur Jaring di Slamaran	1	-	-	-

5	Jalan produksi di Bandengan barat	1,1 km	2.600.000	sudah	Sudah
6	Jalan produksi di Bandengan timur	1,1 km	2.300.000	sudah	Sudah
7	Jalan produksi sudetan barat Di Kel. Degayu	2,085 Km	5.100.000	sudah	Sudah
8	Jalan produksi sudetan timur Kel. Degayu	2,076 Km	5.080.000	sudah	Sudah
9	Jalan Pusat informasi Mangrove (PIM) kel.Kd.Panjang	226 m	522.200	sudah	Sudah
10	Jalan Krematorium (Jalan Kunti) di kel. Kd.Panjang	226 m	650.900	sudah	Sudah
11	Jalan Degayu ke lokasi udang Kel. Degayu (Makam)	523 m	613.600	sudah	Sudah
12	Jalan Degayu ke kali Gabus Kel. Degayu	795 m	932.800	sudah	sudah
13	Jalan Akses Minapolitan PPNP ke jl. Daendles	-	-	-	-
14	Rumah kemas di Jl. Pati Unus	-	-	-	-
15	Pasar Hygienes di Jl. Pati Unus	-	-	-	-
16	Pasar Ikan Hias di Kuripan Kidul	-	-	-	-
17	Jalan sebelah Selatan TPA Kec. Degayu	291m	550.000	sudah	sudah
18	Jl. Sebelah Utara TPA Kec. Degayu	187m	250.000	sudah	sudah

Tabel 21.
Program Kerja Jangka pendek (2013/2014) dan Realisasi
Ditjen SD, Infrastruktur di Zona Inti, Zona Pendukung dan
Zona Keterkaitan.

No	Kegiatan	Volume	Rp.000	DED	RPIJM
ZONA INTI					
1	Breakwater pelabuhan onshore (zone inti)		72.000.000	sudah	Belum
ZONA PENDUKUNG					
2	Irigasi Tambak di Degayu	350 Ha	-	sudah	Belum
3	Pek. Di Degayu				
	Sungai:				

	1. Sungai Banger	2.238 x 70 m	-	Belum	Belum
	2. Sungai Gabus	1,750 x 15 m	-	Belum	Belum
	Saluran :				
	1. Saluran Primer	3.218 x 4 m	-	Belum	Belum
	2. Saluran Tersier	3.816 x 2 m	-	Belum	Belum
	Jalan :				
	1. Jalan Primer	3.270 x 5 m	-	Belum	Belum
	2. Jalan tersier	6.718 x 3 m	-	Belum	Belum
4	Pek di Bandengan				
	Sungai :				
	1. Sungai Meduri (kab.Pekl)	2.990 x 55 m	-	Belum	Belum
	2. Sungai Betingan	990 x 35 m	-	Belum	Belum
	Saluran:				
	1. Saluran Primer	2.111 x 12 m	-	Belum	Belum
	2. Saluran Tersier	2.740 x 5	-	Belum	Belum
	Jalan:				
	1. Jalan Primer	1.241 x 5 m	-	Belum	Belum
	2. Jalan Tersier	3.496 x 4 m	-	Belum	Belum
5	Pek. Di Pabean				
	Sungai :				
	1. Sungai Pencongan	3.060 x 116 m	-	Belum	Belum
	2. Sungai Meduri	2.990 x 55 m	-	Belum	Belum
	Saluran :				
	1. Saluran Primer	2.910 x 5 m	-	Belum	Belum
	2. Saluran Tersier	3.270 x 3 m	-	Belum	Belum
	Jalan:				
	1. Jalan Primer	4.840 x 5 m		Belum	Belum
	2. Jalan Tersier	3.720 x 4 m		Belum	Belum
6	Pek. Di Krapyak Lor				
	Sungai:				
	1. Sungai Banger (polder)	1.570 x 96 m	-	Belum	Belum
	2. Sungai Sibulan	1.220 x 5 m	-	Belum	Belum
	3. Sungai Sigenteng	1.190 x 5 m	-	Belum	Belum
	Saluran:				
	1. Saluran Primer	1.000 x 4 m	-	Belum	Belum
	2. Saluran tersier	2.000 x 3 m	-	Belum	Belum
	Jalan :				
	1. Jalan Primer	2.935 x 6 m	-	Belum	Belum
	2. Jalan Tersier	2.438 x 4 m	-	Belum	Belum
	ZONA KETERKAITAN				
7	<u>Duwet (Pekalongan Selatan)</u> Jalan Usaha Tani	1.500 x 300 m	-	Belum	Belum
8	<u>Soko (Pekalongan Selatan)</u>	700 x 1x1 m	-	Belum	Belum

	Saluran Irigasi				
9	Buaran (Pekalongan selatan) Saluran Irigasi	500 x 1 x 1 m	-	Belum	Belum
10	Pasirsari (Pekalongan barat) Saluran Irigasi	500 x 1 x 1 m	-	Belum	Belum
11	Pringlangu (Pekalongan barat) Saluran Irigasi	1.200 x 1 x 1 m	-	Belum	Belum

Tabel 22..
Program Kerja Jangka pendek (2013/2014) dan Realisasi
Ditjen P2HP Kementerian Kelautan dan Perikanan
Infrastruktur di Zona Inti

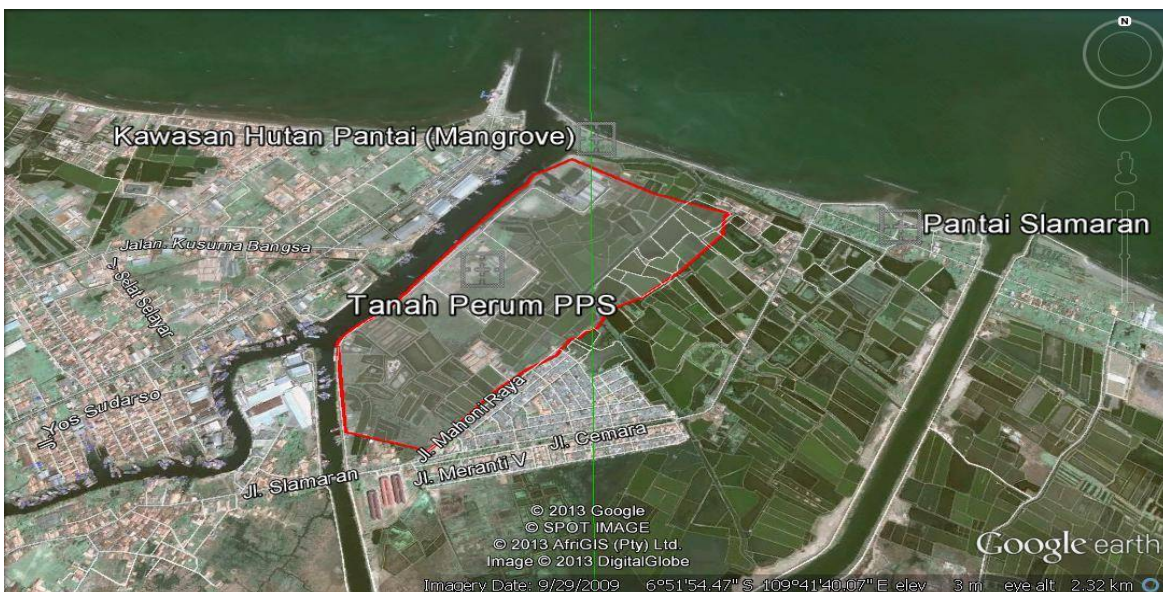
No	Kegiatan	Volume	Rp.000	DED	RPIJM
1	Pabrik es di Slamaran	20 ton	2.500.000	Belum	Belum
2	Cold Storage di Slamaran	100-150 ton	1.100.000	Belum	Belum

2. Penyediaan Tanah untuk Kawasan Inti Minapolitan

Zona Inti Kawasan Minapolitan ini akan memakan lahan seluar \pm 10 Ha. Lahan yang berada dalam penguasaan PPNP sebesar 4,7 Ha, sementara sisanya merupakan lahan yang di kelola Perum Perindo atau PPS (Prasarana Perikanan Samudera) dengan Hak berupa Hak Pengelolaan (HPL). Hal ini menjadi masalah karena pihak Perum PS meminta PPNP untuk membeli tanah yang berada dalam PPS, dengan harga tinggi. Dan akhirnya PPNP untuk sementara hanya melakukan persuasi pada PPS agar pemanfaatan penggunaan tanah yang ada di bawah penguasaan PPS disesuaikan dengan rencana induk kawasan inti Minapolitan



Gambar 7 Rencana pembangunan (Masterplan) Kawasan Inti Minapolitan



Gambar 8. Lokasi Tanah milik PPS

3. Hambatan Pelaksanaan Program Minapolitan

a. Penyediaan Dana

Program Minapolitan merupakan program multi sektor, sehingga menjadi persoalan tersendiri apabila Dinas PPK dan Pemerintah Kota Pekalongan tidak aktif membangun komunikasi dan memberikan persuasi pada sector lain akan pentingnya program minapolitan ini. Bahkan ketika DPPK dan Pemkot Kota Pekalongan sudah melakukan komunikasi aktif apabila tidak disertai dengan kesadaran sector lain dalam meralisasikan minapolitan inipun juga menjadi kendala. Salah satu contohnya adalah alokasi dana pembangunan pelabuhan on-shore yang sudah dilimpahkan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, walaupun sudah jelas alokasi awalnya ditujukan untuk membangun Pelabuhan di Kawasan inti Minapolitan, tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai prioritas lain, sehingga pembangunan pelabuhan ditunda tahun 2014.

b. Penyediaan lahan

Penyediaan lahan menjadi persoalan tersendiri bagi pelaksanaan minapolitan. Kawasan inti yang memerlukan tanah 10 ha di wilayah pelabuhan, akan tetapi tanah yang berada dalam penguasaan PPNP selaku pengelola kawasan inti nantinya hanya menguasai tanah 4 Ha saja, sedangkan sisanya berada dalam penguasaan Perum Prasarana Samudera (PPS) . Dahulu tanah yang dikuasai PPS ini juga merupakan asset dari PPNP, namun diberikan kepada PPS sebagai penyertaan modal. Perubahan struktur cabinet pemerintahan PPS secara hirarki berada dibawah pengelolaan Kementrian BUMN, menyebabkan pengelolaan asset juga berubah. PPNP tidak lagi mempunyai akses terhadap tanah yang berada dalam penguasaan PPS.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan rencana induk minapolitan secara umum sudah sesuai dengan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir. Zonasi atau pembagian kawasan antara rencana induk minapolitan sedikit berbeda dalam hal penamaanya, namun demikian secara fungsional adalah sama
2. Realisasi program kegiatan yang sudah ditetapkan baru mencapai program-program pendukungnya dalam jumlah relative masih sedikit, sedang kegiatan pokok berupa pembangunan fisik di zona inti minapolitan samasekali belum terlaksana
3. Hambatan utama dalam pelaksanaan program minapolitan adalah kesadaran dari semua unsur/sektor yang terlibat untuk bekerjasama merealisasikan program yang sudah ditetapkan.

B. Saran/Rekomendasi

Program Minapolitan yang merupakan program multi sector semestinya tidak dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan secara sektoral

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2002. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kelautan Nasional Sebagai Bagian Dari RTRW Nasional. Kerjasama Departemen Kelautan dan Perikanan R.I. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dengan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Bandung
- Anonim, 2002. Penyusunan Tata Ruang Kelautan Nasional Sebagai Bagian Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor.
- Carter, R.W., (1992). Coastal Conservation. Coastal Zone Planning and Management. Thomas Telford London.
- Dulbahri, 2002. Penyusunan Panduan Rencana Tata Ruang Kawasan. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Bekerjasama Dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Fadel Muhamad. <http://www.slideshore.net/zuhair1410/revolusibiru> (diunduh hari Senin jam 14.00 16 Juli 2012)
- Harsono, Budi (1999). Hukum Agraria Nasional. Penerbit Jambatan
- [http://www. Antaraneews.com/berita/316085](http://www.antaraneews.com/berita/316085), diunduh 12-Juli-2012
- <http://metronews.com> , dikutip jam 11.30 hari Rabu 24 Juli 2012
- <http://www.antaraneews.com/berita/353679/optimalikan> potensi kelautan dan perikanan (diunduh 29 Januari 2013)
- Kay, R. dan Alder, J., 1999. Coastal Planning and Management, E & FN. SPON, London.
- Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. KEP45/DJ.PB/2009 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Minapolitan.
- Saat, Sudirman (2000). Hak Pemeliharaan dan Penangkapan ikan (Eksistensi dan Prospek Pengaturannya). Disertasi PPS UGM, Yogyakarta.
- Sunarto, 2001. Geomorfologi Kepesisiran dan Peranannya dalam Pembangunan Nasional Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Lektor Kepala. Fakultas Geografi UGM.
- Thurman, H.V., 1978. Introductory Oceanography. Bell & Howell Co. Columbus
- Worosuprojo, Suratman (2007). Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berbasis Spasial Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Geografi UGM.